

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Kaderisasi

a. Pengertian Kaderisasi

Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena Kaderisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Hafied Cangara, 2008: 25).

Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117).

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa

kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya (Miriam Budiardjo, 2008: 408).

Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah, umat terbaik. Ini sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Qur'an.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imran: 110)

Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal – hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya. Contoh, dalam kaderisasi pemberi pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin, tapi ternyata ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia sering terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini tidak berjalan. Rasulullah, dalam mengkader, tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan. Allah swt juga telah mengingatkan kunci kaderisasi yang sukses dalam Al-Qur'an.

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. Ash-Shaff: 2-3)

Selanjutnya Rasulullah dalam melakukan kaderisasi selalu teratur dan terencana. Contoh diatas sudah cukup membuktikan bahwa kaderisasi yang beliau bangun selalu terencana dengan sangat baik. Allah swt memberi kunci kaderisasi selanjutnya dalam Al-Qur'an.

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. Ash-Shaff: 4)

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

1. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
2. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
3. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (H. Mangkubumi, 1989: 59).

Selain ketiga komponen di atas, seorang kader juga harus memiliki cita-cita dan idealisme untuk berjuang atau nasionalistik. Idealisme ini merupakan motivasi atau kekuatan pendorong seseorang untuk bersedia berjuang atau melibatkan diri dalam perjuangan. Dewasa ini,

kecenderungan materialistis yang terlihat ditengah masyarakat membuat motif perjuangan dirasa terlalu naif dan tidak realistis. Sudah semestinya seorang kader dituntut untuk memiliki kemampuan berjuang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing karena hanya dengan kapasitas seperti itulah tujuan perjuangan dapat dicapai.

Kemampuan profesional semakin lama semakin terasa dibutuhkan, mengingat konsekuensi dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan diferensiasi dan spesialisasi. Kedua hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan ke arah modernisasi yang perlu disadari sepenuhnya dan diberi respon dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Seorang kader juga diharapkan memiliki stamina atau daya tahan perjuangan karena pada dasarnya tidak ada proses dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang kader dimana ia dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, sistematis, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis perjuangan partai.

Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan konsisten mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif.

a. Pendidikan Kaderisasi

Kaderisasi sebagai pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon

secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek).

Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Jadi, dalam pendidikan kaderisasi memiliki tugas atau tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan cara transformasi nilai-nilai agar tri dharma perguruan tinggi dapat terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan sebagai sebuah proses pentransformasian nilai-nilai yang membuat manusia agar mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya (spiritual, intelektual dan moral). Jadi dengan sendirinya, dalam kaderisasi harus terdapat sebuah persiapan agar mampu beradaptasi dan berintegrasi melalui konsientisasi dalam proses dimana manusia mendapatkan kesadaran yang terus semakin mendalam tentang realitas kultural yang melingkupi hidupnya dan akan kemampuannya

untuk merubah realitas itu dalam ranah pembebasan dari *dehumanisasi*, dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Tidak sekedar mengajar tapi mendidik. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, namun memaksimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam kegiatan ini, yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan (aspek kognitif) dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang (bersifat motivatif). Peningkatan pengetahuan dibutuhkan sebagai bekal untuk dapat melakukan pengamatan, agar analisis yang dilakukan berwawasan luas dan rasional terhadap berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya. Tetapi meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

([Http://sadiinn.blogspot.co.id/2016/04/kaderisasi-dalam-organisasi.html](http://sadiinn.blogspot.co.id/2016/04/kaderisasi-dalam-organisasi.html):08/06/2016:Jam 01.29 WIB.)

b. Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan dan pergumulannya di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam dirinya, perjuangan

mereka akan menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi (H. Mangkubumi, 1989: 62).

Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan (H. Mangkubumi, 1989: 64).

Kaderisasi yang menjadi unsur utama sekaligus penjamin keberlangsungan organisasi harus mampu berfikir lebih maju dan menyeluruh. Ia dituntut untuk lebih mengerti keadaan umat sehingga dapat melakukan pembinaan kader sekaligus membangun rekomendasi rancang kerangka organisasi periode mendatang.

Kaderisasi memiliki banyak kesamaan dengan Pengembangan. Keduanya sama-sama harus berfikir lebih maju dan mengerti keadaan umat. Keduanya sama-sama memiliki tuntutan harus melakukan pembinaan dan bertanggung jawab atas kualitas pemimpin. Satu hal mendasar yang membedakan kami. Pengembangan berbicara mengenai bagaimana kualitas pemimpin saat ini, kaderisasi berbicara mengenai kualitas pemimpin masa depan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kader diterjemahkan sebagai orang yg diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dsb. Sedangkan pengaderan proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah keberhasilan individual. Kita tidak bermain dengan mesin dan buruh organisasi yang bisa bekerja serentak bersama-sama tanpa menggunakan hati dan akal. Kita akan membentuk seorang pemimpin yang pandai bekerja sama. Sebesar

apapun sebuah bangsa ketika tidak dipimpin oleh seorang yang tepat, hanya akan menjadi bangsa yang kering. Laksana orang belajar berenang, banyak bergerak namun tidak berpindah satu meter pun dari tempat asalnya. Sehebat apapun seorang pemimpin tidak akan mampu membuat perubahan tanpa bertumpu pada masyarakat yang cerdas dipimpin. Layaknya pohon tinggi berakar lapuk, akan mudah roboh oleh angin masalah. Maka, sebuah pergerakan yang indah haruslah memiliki sinergisitas yang kuat. Bukan hanya sinergis yang hanya diteriakkan saat kampanye pemilihan, namun sinergis yang telah dirancang dan dipersiapkan jauh sebelum sebuah amanah baru terbentuk.

Keyword yang menjadi fokus kaderisasi adalah masa depan, pendidikan, simultan, dan sinergisitas. Secara garis besar, empat kata itulah yang dapat mewakili kaderisasi. Adanya proses pendidikan simultan untuk mendidik kader-kader secara kolektif yang akan membentuk sinergisitas dalam gerak organisasi di masa depan. Karena kader harus berkualifikasi, maka dibutuhkan pendidikan. Karena pendidikan harus mencakup aspek yang komprehensif, maka dibutuhkan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. Mengingat organisasi membutuhkan kerjasama, maka pembentukan kader harus melahirkan kesadaran dan kepemimpinan kolektif antar personal. Dan hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya sinergitas antar pemimpin. Tidak hanya sinergisitas kerja, namun juga sinergis dalam bentuk keselarasan hati, sikap saling mengerti, dan mampu membentuk bangunan organisasi yang kuat.

Dari pemikiran di atas inilah ruh kaderisasi akan dimulai. Potensi dan tantangan sebuah proses Kaderisasi memang selalu terasa lebih berat, namun janji balasan Tuhan berupa para penerus masa depan akan mampu menjadi obat lelahnya perjuangan ini. Terlalu banyak kegelisahan individual yang tersebar di masyarakat ini. Sekaranglah saatnya menyatukan kegelisahan-kegelisahan tersebut menjadi sebuah kepedulian kolektif yang akan meninggalkan jejak nyata perubahan masa depan.

(<http://hananlutfi.blogspot.com/2012/08/memaknai-hakikat-kaderisasi.html>:08/06/2016:jam 01.43 WIB.)

Dalam pengembangan kaderisasi mencakupi peran, posisi, aspek dan bentuk kaderisasi.

Peran kaderisasi

1. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik

Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain (definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia). Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti Konsepsi, AD ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer.

2. Penjamin keberlangsungan organisasi

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.

3. Sarana belajar bagi anggota

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan di sini mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena dalam kaderisasi terdapat output-output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat di dalam dibentuk karakternya sesuai dengan output. Pengembangan karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah memiliki karakter dan skill sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan itu.

Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu dengan pengajaran (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada skill).

Dengan menggunakan kata pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya pengubahan sikap dan tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek untuk mendekati kesempurnaan pengubahan sikap dan tata laku serta pendewasaan.

Posisi Kaderisasi

1. Strategis

Definisi dalam KBBI, rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Perlu ada perencanaan yang matang dalam organisasi agar tujuannya tercapai, salah satunya adalah kaderisasi yang baik. Bila kaderisasi baik, berarti internal organisasi

tersebut baik. Bila internal kaderisasinya sudah baik, semua tujuan organisasi bisa tercapai dan bisa ‘ekspansi’ ke wilayah eksternal.

2. Vital

Ini menunjukkan urgensi dari kaderisasi. Jika, kaderisasi mati, cepat atau lambat organisasi pun akan mati karena organisasi tidak berkembang dan tidak mampu mengaktualisasi dirinya.

Aspek kaderisasi

Kaderisasi haruslah holistik. Banyak aspek yang harus tersentuh oleh kaderisasi untuk menghasilkan kader yang ideal. Aspek tersebut adalah

1. Fisikal (kesehatan)
2. Spiritual (keyakinan, agama, nilai)
3. Mental (moral dan etika, softskill, kepedulian)
4. Intelektual (wawasan, keilmuan, keprofesian)
5. Manajerial (keorganisasian, kepemimpinan)

Dari setiap aspek, harus ada sinergi dan keseimbangan agar tiap aspek bisa menunjang aspek yang lainnya sehingga potensi si kader teroptimalisasi.

Bentuk kaderisasi

1. Kaderisasi pasif

Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan ‘learning to know’ dan sedikit ‘*learning to be*’. Pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan penjagaan.

2. Kaderisasi aktif

Kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri materinya. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan ‘*learning to know*’, ‘*learning to do*’, dan ‘*learning to be*’ sekaligus. Maka dalam hal ini

sangat penting untuk dipahami, bahwa setiap rutinitas kegiatan, haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara sistematis.

([Http://akusyaifularifin.blogspot.co.id/2011/05/kaderisasi-organisasi.html](http://akusyaifularifin.blogspot.co.id/2011/05/kaderisasi-organisasi.html):08/06/2016: Jam 02.13 WIB.)

c. Masalah Pokok Kaderisasi

Kaderisasi terencana dan berjenjang tampaknya belum menjadi bagian utama program dan strategi pengembangan parpol Indonesia. Kalaupun ada pengecualian, itu terjadi hanya pada satu–dua parpol. Masalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Parpol terlembaga dicirikan oleh beberapa hal, sebagai contoh, seperti masa hidup yang relatif panjang (lama), mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personalia untuk menjalankan peran dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi identifikasi partai, dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa parpol berumur panjang, tetapi tidak mengakar di masyarakat. Demikian juga beberapa parpol mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang. Di luar itu, kecenderungan umum yang terlihat, banyak parpol tidak menunjukkan kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi jabatan-jabatan publik badan-badan pemerintahan. Kelemahan pelembagaan parpol jelas merugikan kepentingan masyarakat.

Masyarakat, yang seharusnya dilayani partai-partai politik dengan kader-kader yang berkualitas mempunyai tanggung jawab, bersih, dan berwawasan dalam menjalankan peran sebagai pejabat, kehilangan kepercayaan atas kinerja badan-badan pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Pada kenyataannya badan-badan pemerintahan itu terisi oleh

personalia yang kurang tepercaya yang disiapkan, diusulkan, atau didukung parpol. Kini, partai-partai politik dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia merupakan sumber utama perekrutan untuk jabatan-jabatan publik.

Kenyataan itu menegaskan, tumpuan keberhasilan kinerja pemerintahan Indonesia sebagian besar dalam pengaruh parpol. Dengan kata lain, parpol berperan penting bagi keberhasilan pemerintahan. Namun, pada saat sama, parpol dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan pemerintahan di Indonesia. Kaderisasi parpol yang berkesinambungan pada dasarnya menyiapkan seluruh aspek pelebagaan parpol sekaligus menjamin keberhasilan pemerintahan. Ini juga berarti jaminan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kader dan nonkader parpol tidak akan muncul karena isu utama bukan seberapa besar parpol akan menguasai pemerintahan, tetapi seberapa bermanfaat parpol dalam pemerintahan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Ketimpangan fungsi parpol tersebut menunjukkan kurangnya proses dan mekanisme kaderisasi parpol. Secara umum kaderisasi dapat didefinisikan sebagai proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai ideologi organisasi kepada anggota(kader) organisasi. Dengan kaderisasi yang baik, keberlanjutan dan pengembangan organisasi di masa depan dapat terjadi.

Dalam konteks parpol, kaderisasi menjadi proses peningkatan kapasitas dan seleksi bagi calon pengisi jabatan politik seperti kepala negara/daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, proses dan mekanisme kaderisasi menjadi hal penting dan strategis bukan hanya bagi parpol tapi juga bagi masyarakat. Kader parpol merupakan calon pejabat publik yang akan menentukan kebijakan publik.

Dalam proses kaderisasi parpol ada empat hal pokok yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek), mekanisme (proses) dan

kurikulum materi kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol. Mereka pula yang akan memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi di masa depan. Mekanisme dan materi biasanya diatur berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga parpol dan peraturan internal partai.

Melakukan proses kaderisasi. Banyak parpol menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk mendongkrak perolehan suara pada proses pemilihan. Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis dan hal ini tentu akan merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat umum, cara mudah menilai kualitas parpol dengan melihat mekanisme dan proses kaderisasinya. Jika sebuah parpol mampu melakukan kaderisasi yang baik dan berkelanjutan sudah hampir bisa dipastikan parpol tersebut memiliki manajemen yang baik. Kaderisasi yang baik juga mencerminkan visi, misi, dan ideologi parpol. Dengan kaderisasi yang baik, tentu parpol mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas secara mental dan intelektual sehingga mampu menjadi pemimpin dan anggota dewan yang kompeten dan berkualitas.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Dilakukan Partai politik dalam Mengatasi Permasalahan yang Terjadi Pada Model Rekrutmen dan Kaderisasi di Tubuh Organisasinya Terdapat kendala-kendala yang sering kali menghambat kinerja partai dalam melakukan rekrutmen anggota baru. Interaksi langsung dengan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan mudah, pemahaman dan daya tangkap masyarakat yang beragam membuat proses diskusi dan pertukaran pikiran kader dengan calon anggota baru kadang sulit mencapai titik temu antar kedua belah pihak sesuai yang diinginkan. Kemampuan daya tangkap masyarakat yang beragam inilah yang membuat

partai politik mengalami kesulitan dalam menyebarkan ideologi partai. Pola pikir masyarakat hanya terfokus pada kesejahteraan, mencari makan dengan mudah, sekolah murah, dan mudah mencari nafkah. Kesulitan dalam merealisasikan keinginan masyarakat kedalam program partai secara nyata membuat kader yang turun ke lapangan menjadi sulit untuk benar-benar masuk dan bisa meyakinkan masyarakat untuk masuk dan mendukung partai.

Pola pikir masyarakat hanya terfokus pada kesejahteraan, mencari makan dengan mudah, sekolah murah, dan mudah mencari nafkah. Kesulitan dalam merealisasikan keinginan masyarakat kedalam program partai secara real membuat kader yang turun ke lapangan menjadi sulit untuk benar-benar masuk dan bisa meyakinkan masyarakat untuk masuk dan mendukung partai. Prakteknya di lapangan untuk menarik simpati masyarakat agar mau masuk dan mendukung partai perlu sosialisasi salah satunya dengan diskusi sederhana. Praktek yang tidak mudah dilakukan karena banyak pemahaman masyarakat yang kurang mampu untuk menangkap wawasan kekinian tentang kondisi Bangsa saat ini. Selain itu, Kemampuan komunikasi kader yang berbeda-beda berdampak pada hasil yang berbeda-beda pula. Kemampuan pemahaman terhadap ideologi, tujuan dan program partai yang seharusnya menjadi senjata utama kader dalam proses menarik simpatik dari masyarakat sering tidak dikuasai penuh oleh kader-kader yang bisa dikatakan “lemah” dalam bidang akademis.

Upaya yang dilakukan partai politik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen salah satunya dengan menugaskan kader-kader unggulan di tiap daerah untuk dijadikan motor utama penggerak di masyarakat. Partai politik mendahulukan tindakan nyata dalam proses pendekatan ke masyarakat dengan membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk menarik minat masyarakat ikut serta

dalam sebuah kegiatan, baru setelah itu dilakukan proses interaksi lewat komunikasi dengan masyarakat.

Tujuannya adalah agar masyarakat tahu terlebih dahulu bahwa partai politik yang pro rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Upaya pengatasian kendala dalam proses rekrutmen tersebut dapat dilihat bahwa selain komunikasi secara langsung dengan masyarakat ternyata program yang pro rakyat lebih menarik simpati dari masyarakat. Fakta di lapangan masyarakat saat ini sulit jika hanya dijejali dengan kata-kata, pemikiran, atau sesuatu yang belum jelas penggambarannya, tetapi masyarakat lebih mudah jika melihat satu kebijakan yang benar-benar berguna bagi masyarakat.

Hal ini coba diatasi oleh partai dengan menekankan kepada para kader bahwa pendidikan kader merupakan kegiatan wajib dan penting untuk para kader yang telah dipilih menjadi delegasi untuk mewakili ranting, cabang, maupun daerah untuk mengikuti kegiatan pendidikan kader. Digunakan juga sistem penilaian berdasarkan prestasi kader, hal ini membuat semangat kader untuk ikut sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kader di berbagai tingkat dapat maksimal. Cara ini terbukti efektif dengan munculnya kompetisi di antara para kader dalam membuktikannya prestasi dan kinerjanya di partai agar terpilih menjadi delegasi ranting, cabang, atau daerah sebagai delegasi peserta pendidikan dan pelatihan kader.

(<http://balebengong.net/opini/2012/03/20/macetnya-kaderisasi-partai-politik-di-bali.html>:08/06/2016/: Jam 02.24 WIB.)

(<http://ngopibro.blogspot.co.id/2013/04/dinamika-partai-politik-indonesia-dan.html>:08/06/2016/: Jam 02.24 WIB.)

2. Tinjauan Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assiddiqie

berasal dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.

Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik (Muhammad Ali Syafa'at, 2011: 30).

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.

Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi partai politik”.

Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2008: 404) adalah:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*”).

Pendapat mengenai definisi partai politik juga dikemukakan oleh Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008: 404):

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with the other group or groups holding divergent views*)”.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Menurut Cheppy Haricahyono, partai politik merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang merdeka dan berdaulat.

Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada (Cheppy Haricahyono, 1991: 189).

Menurut Dr. H. Sunatra, SH., MS., (2016: 99),

“Pendidikan politik dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan pendapat Branson (1998) karakteristik warga Negara

melek politik adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan kedalam tiga komponen penting, yaitu: 1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan, berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara; 2) *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga Negara yang relevan; dan 3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.”

b. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Menurut Undang-undang Kepartaian No. 2 Tahun 2011 Pasal 2:

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

- h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum Dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

a) Dasar Hukum

1. Dasar hukum Pendaftaran Pendirian dan Pembentukan Partai Politik adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Dasar Hukum Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum adalah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

b) Pendaftaran Partai Politik

Permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru menjadi

badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai a. A. Politik harus diajukan sekurang-kurangnya oleh Ketua Umum partai politik dengan mengisi formulir Lampiran I yang telah disediakan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi dan didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris yang memuat:
 1. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kepengurusan pusat partai politik;
 2. Pendiri dan pengurus partai politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- b. Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan:
 1. Salinan akta notaris pendirian dan pembentukan partai politik bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang memuat:
 - a. Pendiri
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan:
 - (1) asas dan ciri partai politik;
 - (2) visi dan misi partai politik;
 - (3) nama, lambang atau tanda gambar partai politik;
 - (4) tujuan dan fungsi partai politik;
 - (5) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - (6) kepengurusan partai politik;
 - (7) mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik;
 - (8) sistem kaderisasi;

- (9) mekanisme pemberhentian anggota partai politik;
 - (10) peraturan dan keputusan partai politik;
 - (11) pendidikan politik;
 - (12) keuangan partai politik; dan
 - (13) mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik (yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain).
2. nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebanyak 2 (dua) asli dan 5 (lima) fotokopi;
 3. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan daftar kepengurusan partai politik:
 - a. pada setiap provinsi disertai
 - (1) Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya
 - (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang (antara lain pejabat yang menandatangani KTP atau setingkat di atasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - b. paling sedikit 75 % dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan disertai

- (1) Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya
 - (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang (antara lain pejabat yang menandatangani KTP atau setingkat di atasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- c. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan disertai:
- (1) Surat Keterangan dari Camat bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya.
 - (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang (antara lain pejabat yang menandatangani KTP atau setingkat di atasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
4. Alamat kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak berubah sampai tahapan terakhir pemilihan umum yang dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan domisili partai dari lurah/kepala desa setempat;
 - b. bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan akhir April 2014.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa orang

bersangkutan benar pendiri atau pengurus dari partai tersebut dan tidak menjadi pendiri, pengurus atau anggota partai lain. (Lampiran II)

6. Bukti rekening atas nama partai politik berupa keterangan dari bank.
3. Dokumen sebagaimana tersebut pada huruf B di atas merupakan dokumen terbaru yang diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Dokumen yang telah diserahkan oleh partai politik menjadi milik negara yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tidak dapat ditarik kembali.

c) Proses Pendaftaran, Penelitian Dan/Ata Verifikasi, Dan Pengesahan Partai Politik

a. Pendaftaran

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendirian dan pembentukan partai politik baru menjadi badan hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Penyerahan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan penelitian dan/atau verifikasi.

3. Dalam menerima pendaftaran, petugas pendaftaran:

- a. memberikan tanda terima sementara berkas permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik baru menjadi badan hukum yang belum lengkap (Lampiran III);
- b. memberitahukan kekurangan persyaratan administratif tersebut

kepada pemohon;

- c. memberikan tanda terima bahwa partai politik yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan yang kurang.
- d. mencatat dalam buku register permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik baru menjadi badan hukum, yang meliputi:
 - 1) nama pemohon/kuasanya;
 - 2) waktu dan tanggal permohonan;
 - 3) nama partai politik
 - 4) nama pengurus/pimpinan pusat partai politik;
 - 5) alamat tetap sekretariat partai politik;
- e. memproses permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik baru menjadi badan hukum yang telah lengkap.

b. Penelitian Dan Verifikasi

1. Untuk mengesahkan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan partai politik baru menjadi badan hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap partai politik pendaftar yang telah memenuhi persyaratan.
2. Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan secara administratif dan periodik bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
3. Penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Tugas Tim adalah memeriksa dan meneliti, baik secara

administratif maupun substansial terhadap persyaratan permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendaftaran partai politik baru.

5. Dalam melakukan penelitian dan/atau verifikasi partai politik, Tim dapat melakukan penelitian/verifikasi langsung kepada instansi atau kantor yang menerbitkan persyaratan administratif pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendirian dan pembentukan partai politik baru yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
 6. Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
3. Pengesahan Partai Politik
1. Pengesahan penyesuaian partai politik berbadan hukum dan partai politik baru menjadi badan hukum dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan setelah menyerahkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada:
 - i. Mahkamah Agung;
 - ii. Mahkamah Konstitusi;
 - iii. Menteri Dalam Negeri;
 - iv. Komisi Pemilihan Umum;
 - v. Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 4. Pedoman Mengenai Penggunaan Nama, Lambang Atau Tanda Gambar Partai Politik:

- a. Nama, lambang atau tanda gambar partai politik tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain.
- b. Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain.
- c. Dalam hal ada partai politik yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain, maka cara penyelesaiannya adalah:
 - 1) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang atau tanda gambar antara partai politik baru yang mendaftar dan partai politik yang telah berbadan hukum, maka partai politik baru yang mendaftar harus mengubah nama, lambang atau tanda gambarnya;
 - 2) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang atau tanda gambar antar partai politik yang mendaftar, maka partai politik yang mendaftar kemudian harus mengubah nama, lambang atau tanda gambarnya. Apabila hari dan tanggalnya sama, maka yang dipergunakan sebagai pedoman adalah jam pada waktu memasukkan permohonan pendaftaran.
4. Selain itu, partai politik juga dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan:
 - 1) bendera atau lambang negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/symbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan

ini.

lambang lembaga negara atau lambang pemerintah.

- 2) Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya: lambang MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah, seperti kementerian, lembaga pemerintah lain, dan pemerintah daerah.

c. Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti, ada tujuh fungsi partai politik yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Ramlan Surbakti, 2007: 119).
2. Pemadu kepentingan. Keadaan masyarakat modern yang semakin

luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, partai politik memerankan sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah (Miriam Budiardjo, 2008: 405).

3. Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal) maupun tidak sengaja (melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan atau masyarakat). Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang

dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Indoktrinasi politik biasa dilakukan di negara dengan sistem totaliter (Ramlan Surbakti, 2007:117).

Miriam Budiardjo mengatakan proses sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Bagi partai politik, proses sosialisasi politik juga merupakan upaya pembentukan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum (Miriam Budiardjo, 2008: 407).

4. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik (Ramlan Surbakti, 2007: 118).
5. Pengendali konflik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
6. Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

7. Fungsi partai politik sebagai kontrol politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Tolok ukur yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolok ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolok ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama (Ramlan Surbakti, 2007: 118). Dalam keadaan yang sehat dan demokratis, masyarakat selalu berkembang dan perkembangan itu secara otomatis akan dengan sendirinya memaksa adanya perubahan (transformasi sosial) yang membutuhkan sebuah kontrol. Kontrol yang dilakukan haruslah bersifat terbuka (diketahui dan diterima oleh masyarakat), mendidik, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam bernegara seperti yang dikehendaki Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan melakukan kontrol dianggap penting karena menyangkut hak setiap warga negara untuk tahu (*rights to know*) terhadap apa yang akan terjadi didalam negaranya, karena hal tersebut menyangkut rasa berkebangsaan dan tanggung jawab terhadap perkembangan negara (H. Mangkubumi, 1989: 43).

Berdasarkan kenyataannya, tidak semua fungsi partai politik dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politiknya, akan tetapi juga dapat dipengaruhi faktor lain, seperti tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik (berakar atau tidaknya partai dalam masyarakat), kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya (Ramlan Surbakti, 2007:

d. Peran Partai Politik

Peran Partai Politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peranan partai politik yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia, perlu adanya perbaikan dalam tubuh partai politik Indonesia. Peran yang sedemikian besar dalam demokrasi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan kinerja partai politik saat ini, yang hanya fokus pada perebutan kekuasaan dan kepentingan kelompok yang hanya bekerja pada saat menjelang pemilihan umum serta mengabaikan fungsi utama partai politik.

Oleh karenanya diharapkan partai politik mampu menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik sarana sosialisasi politik, serta rekrutmen politik. Sebagai sarana komunikasi politik, kader-kader partai politik yang ada legislatif harus selalu intensif dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya, mereka harus melakukan pertemuan rutin dengan para konstituen sehingga wakil rakyat yang ada di legislatif benar-benar mewakili suara rakyat.

Dalam hal ini partai politik memiliki peran untuk mengontrol kader-kadernya sehingga peran partai politik sebagai jembatan atau sarana komunikasi antar rakyat dan pemerintah berjalan dengan baik. Sedangkan sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik harus selalu aktif memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan kepedulian dan kesadaran politik, dalam hal ini.

Partai politik tidak hanya bekerja ketika menjelang pemilu saja, tapi partai politik juga terus bekerja sepanjang tahun karena partai politik bertanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik terhadap seluruh warga negara demi kemajuan sistem demokrasi yang ada. Sebagai sarana rekrutmen politik, ini merupakan fungsi partai politik yang paling penting dalam sistem demokrasi, baik buruknya suatu pemerintahan tergantung aktor-aktor yang menjalankannya. Oleh karena itu partai politik harus selektif dalam melakukan rekrutmen, tidak hanya melakukan hal pragmatis demi kepentingan kelompok saja. Diharapkan partai politik mampu menyeleksi dan mendidik kader-kader yang militan yang siap untuk mengabdikan dirinya terhadap pemerintahan

sehingga pemerintahan yang ada benar-benar dikendalikan oleh orang-orang yang berkualitas bukan orang-orang karbitan. Jika partai politik mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka cita-cita yang ada dalam pembukaan dalam undang-undang dasar dan nilai-nilai dalam Pancasila bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya sekedar harapan tapi akan benar-benar dapat dirasakan.

(https://www.academia.edu/8522803/peran_partai_politik_sebagai_kekuatan_dalam_sistem_demokrasi_di_indonesia:/08/06/2016:jam 12.11 WIB.

e. **Sejarah Partai Politik di Indonesia**

Sejarah partai politik di Indonesia dari sejak dulu kala hingga saat sekarang memang penuh liku-liku dan menarik. Tapi yang jelas, sejarah parpol di Indonesia sangat panjang dan menarik untuk kita telusuri. Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap masa waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing,

1. Masa penjajahan Belanda

Berbicara sejarah partai politik di Indonesia, pada dasarnya harus di mulai dengan adanya organisasi kemasyarakatan yang memosisikan diri dalam perjuangan di bidang pendidikan dan pengajaran. Organisasi kemasyarakatan yang di maksud adalah Budi Utomo, yang di dirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo. Walaupun Budi Utomo di bentuk hanya sebagai organisasi sosial, namun jati dirinya melekat rasa perjuangan melawan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Budi Utomo Merupakan cikal bakal berdirinya partai politik di era pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman penjajahan Belanda, partai – partai politik tidak dapat hidup tenteram. Tiap partai yang bersuara menentang atau bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan

atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dan dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Perlu di jelaskan bahwa partai politik pada zaman pra kemerdekaan pada umumnya bertujuan untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita Indonesia ke depan.

Setelah Indische Partij di bubarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, maka pada tahun 1919 kembali di dirikannya National Indische Partij (NIP) yang kemudian di susul lahirnya partai-partai politik baru, antara lain:

- 1). Indische Social Democratische Vereniging (ISDV),
- 2). Partai Nasional Indonesia,
- 3). Partai Indonesia,
- 4). Partai Indonesia Raya,
- 5). Serekat Islam,
- 6). Partai Katolik, dan lain-lain.

Partai-partai politik ini di dirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan kearah kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan sekelompok orang yang terlingkup di dalam suatu bangsa, tanpa perlu menghubungkannya dengan aliran yang hidup dalam masyarakat, maupun ajaran agama yang di anut.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamim, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik – partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

2. Masa pendudukan Jepang

Pemerintahan militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di bawah pimpinan “ Empat Serangkai “, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H Mansyur. Atas perintah pemerintah Jepang partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944.

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).

3. Masa Merdeka (mulai 1945)

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multi partai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik. Dan dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat yang antara lain:

- a. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karna dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin kejalan yang teratur,
- b. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum di langungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan januari 1946.

Adanya Maklumat pemerintah tersebut, ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dan elit politik pada saat itu, yang di tandai dengan berdirinya partai-partai politik, seperti:

1. Partai Sosialis,
2. Partai Buruh Indonesia,
3. Partai Nasional Indonesia (PNI),
4. Partai Komunis Indonesia (PKI),
5. Partai Rakyat Jelata atau Murba,
6. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Tentang Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Nopember Tahun 1945 tersebut, Arbi Sanit berkomentar bahwa:

"Setelah keluarnya Maklumat pada tanggal 3 Nopember tahun 1945, dari pada organisasi-organisasi social dan partai politik yang sudah di bentuk, baik pada masa kekuasaan pemerintah colonial Belanda, maupun pada masa kekuasaan Jepang. Demikian pula dengan partai-partai politik yang baru sebagai respon atas keluarnya maklumat tersebut."

Menurut maklumat itu tugas partai – partai terutama ialah untuk menyalurkan aliran yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pemilu. Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 timbulah partai – partai politik di Indonesia laksana jamur di waktu hujan.

Pemilihan umum yang diadakan tahun 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan organisasi politik. Masa ini disebut sebagai masa kejayaan partai politik. Tapi kemudian, sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Banyaknya partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer telah mengakibatkan tidak stabilnya pemerintah, kabinet silih berganti dalam waktu yang relatif singkat. Banyak di antara partai – partai tersebut kemudian dilarang atau ditolak pengakuannya oleh pemerintah.

Daftar Nama Parpol Pemilu 1955 Ada 28, diantaranya:

1. Partai Nasional Indonesia,

2. Masyumi,
3. Nahdlatul Ulama,
4. Partai Komunis Indonesia,
5. Partai Syarikat Islam Indonesia.
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Katolik
8. Partai Sosialis Indonesia
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)
12. Partai Buruh
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
16. Murba
17. Baperki
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR)
19. Grinda
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
21. Persatuan Daya (PD)
22. PIR Hazairin
23. Partai Politik Terikat Islam (PPTI)
24. AKUI
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)
26. Partai Republik Indonesia Merdeka
27. Angkatan Komunis Muda (Acoma)
28. R. Soejono Prawirisoedarso

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan membentuk UUD baru. Ada 260 kursi DPR dan 520 kursi ditambah 14 wakil golongan minoritas untuk konstituante yang diperebutkan. Pemilu yang dipersiapkan di bawah

pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dilangsungkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 yang diikuti 29 partai untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Lima besar pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante, Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan lima tahun berikutnya karena berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante serta pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 pada 4 Juni 1960 yang digantikan oleh DPR-Gotong Royong dan MPRS yang anggotanya diangkat Presiden Soekarno.

Pada masa demokrasi terpimpin peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

4. Masa Orde Baru

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru (1965 – 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 5 Januari 1973 NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI telah memfungsikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10

Januari 1973 telah berfusi dalam satu wadah yang bernama Partai Demokrasi (PDI).

Maka sesuai dengan Tap MPR No VIII / 1973 , pemilihan umum yang diselenggarakan selambat – lambatnnya akhir tahun 1977 akan diikuti oleh 2 golongan politik PPP dan PDI dan ditambah 1 Golongan Karya (GOLKAR) yang dibentuk sejak tahun 1971. Dua partai politik dan golongan karya sebagai kesatuan politik pada masa Orde Baru yang mengikuti pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1975 yang diganti dengan UU Tahun 1985. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang ditanda tangani dengan pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998 yang karena diduga melakukan banyaknya Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Adapun partai – partai yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan yang ada pada saat pemilihan umum tahun 1971:

- a) Partai Nasional Indonesia (PNI)
- b) Nahdatul Ulama (NU)
- c) Partai Katolik
- d) Partai Indonesia (PARTINDO)
- e) Partai Murba
- f) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
- g) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
- h) Partai Kristen Indonesia (PARKINDO)
- i) Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiah Islamiyah)
- j) Partai Muslim Indonesia (PARMUSI)

Selama masa Orde Baru, pemilu berlangsung sebanyak enam kali dari 1971 hingga 1997. Pemilu 1971 diseenggarakan pada 5 Juli 1971 dengan peserta 10 partai politik dan merupakan pemilu pertama setelah berdirinya orde baru. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I Propinsi dan tingkat II Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk Propinsi Irian Jaya, ini merupakan pemilu pertama

bagi mereka setelah bergabung dengan Indonesia pada 1963. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Dan pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Pemilu 1977 diawali dengan fusi (penggabungan) partai-partai politik melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 yang menghasilkan dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya. Selama pemilu Orde Baru berikutnya hingga 1998, pemilu hanya diikuti oleh tiga partai ini. Pemilu 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilihan umum pada 1982, 1987, dan 1992 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II. Ketiga pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Setelah gelombang reformasi, Indonesia bersistem multi partai dan terus berlanjut hingga sekarang.

5. Masa Reformasi

Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah, keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa politik, dan kian mengkrystalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik.

Hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan – kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai – partai politik sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu tidak heran dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2002 yang memungkinkan lahirnya partai – partai baru dalam percaturan kepartaian di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai hanya ada 5 partai yang memperoleh suara yang signifikan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Harapannya adalah dengan kehadiran banyak partai itu jangan sampai justru menambah ruwetnya sistem pemerintahan NKRI. Ruwetnya pemerintahan ini mengakibatkan bangsa Indonesia akan banyak mengalami kendala untuk segera keluar dari krisis multidevresional yang sudah berjalan. Pada pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2003. Untuk menindak lanjuti pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 tersebut dibuatlah UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden Langsung. Yang dalam penjelasan antara lain diuraikan bahwa salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut Undang – Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

diusulkan oleh partai politik gabungan – gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum “.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang dilaksanakan secara LUBER serta JURDIL(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil) yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Semenjak Rezim Orde Baru runtuh, Pada tahun 1998 hingga tahun 2009 berbagai macam partai politik pun lahir, tidak seperti halnya pada masa orde baru berkuasa yang hanya ada 3 partai politik saja yang di perbolehkan ikut dalam pentas politik. Pada tahun 1999 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu berjumlah 48 partai politik dan hasil pemilu tahun 1999 ini melahirkan Mega Wati Soekarno Putri Sebagai Presiden Republik Indonesia, dan pada tahun 2004 Partai politik berjumlah 24 Partai. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:

1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia - Supeni
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Ummat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia

Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Hasil pemilu tahun 2004 tersebut mengantarkan Susilo Bambang

Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia Ke 6 (enam) setelah Mega Wati Soekarno Putri. Namun Di saat perjalanan pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah terjadi gerakan Separatis yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dilakukan Oleh Gerakan Aceh Merdeka, Namun pergerakan GAM tersebut dapat di redam setelah Pemerintah Indonesia mengadakan Peoses perdamaian pada tahun 2005.

Proses perdamaian tahun 2005 tersebut telah mentranspormasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis, sekaligus laboratorium Demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Setelah sukses dengan eksperimen calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2006, dalam pemilu tahun 2009, Aceh mempelopori lahirnya partai Politik lokal, 6 (enam) Partai politik 2 (dua) diantaranya berbasis mantan gerakan Pro kemerdekaan dan referendum-bertarung bersama 38 (tiga puluh delapan) Partai politik Nasional.

Untuk lebih jelasnya akan menguraikan Partai politik Nasional dan partai politik lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu Tahun 2009, Dalam tabel berikut:

Jumlah Partai Politik Nasional Dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2009 Berdasarkan Nomor Urut:

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah

13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golkar
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Aceh Aman Sejahtera (Parpol Lokal Aceh)
36. Partai Daulat Aceh (Parpol Lokal Aceh)
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Parpol Lokal Aceh)
38. Partai Rakyat Aceh (Parpol Lokal Aceh)
39. Partai Aceh (Parpol Lokal Aceh)
40. Partai Bersatu Aceh (Parpol Lokal Aceh)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
43. Partai Serikat Indonesia
44. Partai Buruh

Berikut adalah daftar 12 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014:

1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa*
3. Partai Keadilan Sejahtera*
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*
5. Partai Golongan Karya*
6. Partai Gerakan Indonesia Raya*
7. Partai Demokrat*
8. Partai Amanat Nasional*
9. Partai Persatuan Pembangunan*
10. Partai Hati Nurani Rakyat*
11. Partai Bulan Bintang (No. Urut 14)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (No. Urut 15)

Catatan: Tanda * menandakan partai yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya.

Partai politik lokal Aceh

1. Partai Damai Aceh
2. Partai Nasional Aceh
3. Partai Aceh

([Http://sigitwhibowo.blogspot.com/2010/04/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html](http://sigitwhibowo.blogspot.com/2010/04/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html):08/06/2016:Jam 12.16 WIB.)

f. Perbandingan Partai Politik

1) Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan

legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif (atau peradilan).

Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Susunan dan kedudukan pemerintah federal dijelaskan di dalam konstitusi. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, mendominasi politik di Amerika sejak perang saudara, meskipun partai-partai lain juga ada. Terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan kekuasaan yang lebih luas dipegang oleh Mahkamah Agung, pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi dua partai politik. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokratis maju di dunia, di mana partai-partai ketiga memiliki pengaruh politik yang kecil.

Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi, sebagian besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintah negara bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah county (setara kabupaten), munisipalitas, dan distrik khusus. Tumpang tindihnya wilayah hukum ini mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, sejak koloni-koloni didirikan secara terpisah dan memerintah wilayah masing-masing, merdeka satu sama lain. Satuan-satuan pemerintah daerah diciptakan oleh koloni-koloni untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu negara bagian. Seiring meluasnya negara ini, pemerintah federal menganjurkan agar negara-negara bagian baru meniru sistem yang telah ada.

Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini adalah perkecualian di Dunia Eropa untuk budaya politik mereka yang bergelora, yang menarik orang-orang muda yang penuh ambisi dan paling berbakat ke dunia politik.] Pertama, hak suara adalah yang paling tersebar luas di dunia, di mana setiap orang yang memiliki sejumlah tertentu propertas (tanah dan bangunan) dibolehkan untuk menyalurkan suaranya. Sedangkan kurang dari 1% orang Britania dapat menyalurkan suara mereka, mayoritas orang Amerika yang berkulit putih dianggap memenuhi persyaratan. Sementara akar-akar demokrasi mulai tampak jelas, justru rasa sungkan dan segan ditunjukkan kepada kaum elite sosial dalam pemilihan umum zaman *colonial*.

Keseganan dan rasa sungkan itu berkurang drastis seiring terjadinya Revolusi Amerika. Kedua, di tiap-tiap koloni, sejumlah besar bisnis swasta dan publik ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah-pemerintah county dan majelis-majelis. Topik perhatian masyarakat dan perdebatan meliputi pembagi-bagian lahan, subsidi dagang, dan pajak, juga pengawasan jalan, bantuan bagi orang miskin, warung dan kedai, juga sekolah. Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena gugatan-gugatan perdata semakin lazim terjadi. Urusan hukum diawasi oleh para hakim dan para juri setempat, dengan peran sentral berada pada pengacara terlatih. Situasi demikian memicu perkembangan cepat profesi di bidang hukum, dan peran dominan para pengacara di dunia politik tampak jelas pada dasawarsa 1770-an, seperti yang telah ditunjukkan oleh karir John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya. Ketiga, koloni-koloni Amerika adalah perkecualian dalam konteks dunia karena tumbuhnya perwakilan kelompok-kelompok minat yang berbeda-beda. Berbeda dengan Eropa, di mana pengadilan kerajaan, keluarga-keluarga ningrat dan gereja yang telah lama berdiri berada dalam kendali, budaya politik Amerika terbuka bagi para saudagar, tuan tanah, petani kecil,

tukang, penganut Anglikan, penganut Presbiter, kaum Quaker, orang Jerman, orang Irlandia, orang Skotlandia, Yankee, orang York, dan banyak kelompok lainnya yang tidak dikenal. Lebih dari 90% perwakilan dipilih untuk menjadi dewan legislatif yang menetap di distrik masing-masing, tidak seperti Inggris di mana di sana adalah biasa memiliki anggota parlemen dan anggota absensi parlemen. Terakhir, yang paling dramatis, orang Amerika terpesona oleh dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang menitikberatkan persamaan hak, keperluan warga negara yang baik, dan kejahatan korupsi, kemewahan, dan keningratan. Tidak satupun koloni memiliki partai politik yang terbentuk pada dasawarsa 1790-an, tetapi masing-masing mengelompokkan faksi-faksi yang berlomba-lomba meraih kekuasaan.

- **Pemerintahan negara bagian**

Pemerintahan negara bagian memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang pada semua subjek yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang diserahkan kepada negara bagian menurut konstitusi. Kekuasaan-kekuasaan ini di antaranya pendidikan, hukum keluarga, kontrak, dan sebagian besar hukum pidana. Tidak seperti pemerintah federal, yang hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan itu berdasarkan konstitusi, pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan melekat yang memungkinkannya bertindak, kecuali jika dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara bagian.

Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif negara bagian adalah gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, yang biasanya

bertugas untuk masa bakti empat tahun (meskipun di beberapa negara bagian lain hanya dua tahun). Kecuali untuk Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian memiliki legislatif dua kamar, di mana biasanya majelis tinggi disebut Senat dan majelis rendah disebut Dewan Perwakilan Rakyat, badan deliberatif atau yang serupa dengannya. Di sebagian besar negara bagian, para senator bekerja untuk masa bakti empat tahun, dan para anggota majelis rendah bekerja untuk masa bakti dua tahun. Konstitusi negara-negara bagian berbeda dalam beberapa rinciannya, tetapi secara umum mengikuti pola yang sama dengan konstitusi federal, termasuk pernyataan hak-hak rakyat dan rencana perlembagaan pemerintah. Tetapi, konstitusi negara bagian lebih terperinci.

- **Pemerintahan daerah**

Terdapat 89.500 pemerintah daerah, meliputi 3.033 kabupaten (*county*), 19.492 munisipalitas, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik khusus lainnya yang berkenaan dengan perkara-perkara perlindungan kebakaran. Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan (*sanitarium*), peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan. Biasanya pemilihan umum daerah bersifat nonpartisan-pegiat daerah melepaskan keterkaitan mereka terhadap partai politik ketika berkampanye dan memerintah. Kira-kira 28% penduduk

menetap di kota-kota dengan 100.000 populasi atau lebih. Pemerintah-pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh negara bagian, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mayoritas kota besar, organisasi-organisasi kerja sama federal dan negara bagian adalah penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis-jenis pemerintah kota berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Tetapi, hampir semuanya memiliki dewan pusat (*central council*), yang dipilih oleh para pemilik suara, dan seroang petugas eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki politik daerah nonpartisan. Ada tiga jenis umum pemerintah kota: wali kota-dewan, komisi, dan dewan-pengelola. Ketiga-tiga ini adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dari dua atau tiga pola di atas.

- **Partai politik dan pemilihan umum**

Konstitusi Amerika Serikat tidak pernah secara formal membahas hal-ikhwal partai politik, terkhusus karena para pendiri bangsa aslinya tidak menentukan politik Amerika sebagai partisan. Dalam Makalah Federalis No. 9 dan No. 10, Alexander Hamilton dan James Madison, masing-masing menulis secara khusus tentang bahaya faksi politik dalam negeri. Dan lagi, Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, bukanlah seorang anggota partai politik manapun pada masa pemilihannya atau selama dia menjabat sebagai presiden. Lebih jauh lagi,

dia berharap bahwa partai-partai politik tidak perlu dibentuk, khawatir akan terjadinya konflik dan kemandekan politik. Meskipun demikian, permulaan sistem dua partai di Amerika mulai muncul dari lingkaran terdekat penasihatnya, termasuk Hamilton dan Madison. Di dalam pemilihan umum partisan (berpartai), para calon diajukan oleh partai politik atau mencari kantor publik sebagai peserta independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk tampil pada surat suara pemilihan umum. Biasanya, para calon dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat primer partai yang bersangkutan, sedangkan para calon dari partai kecil atau independen harus melengkapi proses permohonan. Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua-dua partai ini memenangi setiap Pemilihan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian. Di antara dua partai besar, Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika, sedangkan Partai Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika.

Tidak seperti Britania Raya dan sistem parlementer lainnya, rakyat Amerika Serikat menyalurkan suaranya kepada calon tertentu, bukan memilih partai politik tertentu. Dengan sebuah pemerintah federal, para pegawai dipilih di tataran federal (nasional), negara bagian, dan daerah. Pada tataran nasional, presiden, dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, melalui Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada masa modern, para anggota lembaga tersebut selalu menyalurkan suaranya berdasarkan suara rakyat di masing-masing negara bagian. Seluruh anggota Kongres, dan kantor-kantor pada tataran negara bagian dan daerah dipilih secara langsung. Undang-undang federal dan negara bagian sama-sama mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Konstitusi Amerika Serikat mendefinisikan (hingga ke perluasan mendasar) bagaimana pemilihan umum federal dilaksanakan, dalam Artikel Satu dan Artikel Dua dan berbagai amandemen. Undang-undang negara bagian mengatur sebagian besar aspek hukum elektoral, termasuk primary, kelayakan para pemilik suara (melebihi definisi konstitusional dasar), jalannya lembaga pemilihan presiden di masing-masing negara bagian, dan jalannya pemilihan Organisasi partai politik di Amerika Serikat terorganisasi secara lebih longgar dibandingkan dengan negara lain. Dua partai besar, secara khusus, tidak memiliki organisasi formal pada tataran nasional yang mengendalikan keanggotaan, kegiatan, atau posisi kebijakan, meski terdapat beberapa negara bagian yang terafiliasi melakukannya. Dengan demikian, bagi seorang Amerika untuk

mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Demokrat atau Partai Republik, cukup berbeda bila dibandingkan dengan orang Britania yang mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Buruh atau Partai Konservatif. Di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi "anggota" sebuah partai, dengan hanya mengatakannya. Di beberapa negara bagian, seorang pemilik hak suara dapat mendaftarkan diri sebagai anggota salah satu partai dan/atau memilih di pemilihan primer untuk partai tersebut atau partai lainnya. Keikutsertaan tersebut tidak membatasi pilihan seseorang dengan cara apapun. Juga tidak memberikan seseorang hak-hak atau tanggung tertentu bagi partai, selain daripada memungkinkan orang tersebut menyalurkan suaranya pada pemilihan primer partai tersebut. Seseorang dapat memilih menghadiri rapat komisi partai lokal pada suatu hari, dan menghadiri komisi partai lain di hari yang lain. Salah satunya faktor yang membawa seseorang "lebih dekat pada tindakan itu" adalah kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam kegiatan partai dan kemampuannya untuk mengimbau pihak lain untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Identifikasi partai menjadi sesuatu yang lebih bersifat formal ketika seseorang maju aktif untuk memihak salah satu partai. Di sebagian besar negara bagian, hal ini berarti menyatakan diri sendiri sebagai calon dari partai tertentu, dan berniat mengikuti pemilihan primer partai yang bersangkutan untuk memasuki penugasan tertentu. Sebuah komisi partai dapat memilih untuk menguasai seseorang yang sedang mencari pencalonan, tetapi pada akhirnya pilihan diserahkan kepada

orang yang memilih untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan primer, dan seringkali sulit untuk mengatakan siapa yang akan ambil bagian penyaluran suara.

Hasilnya adalah bahwa partai-partai politik di Amerika memiliki organisasi sentral yang lemah dan ideologi sentral yang kecil, kecuali melalui permufakatan. Sebuah partai tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak menyetujui mayoritas posisi partai atau bekerja dengan aktif melawan kehendak partai untuk menyatakan pendakuan keanggotaan partai, sepanjang para pemilik suara yang memilih untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan primer memilih orang tersebut. Sekali memasuki masa penugasan, petugas terpilih dapat mengubah partai hanya dengan menyatakan niat tersebut.

Pada tataran federal, masing-masing dua partai besar memiliki sebuah komisi nasional (lihat Komisi Nasional Demokrat dan Komisi Nasional Republik) yang bertindak sebagai pusat bagi pengumpulan dana dan kegiatan kampanye, terkhusus dalam kampanye pemilihan presiden. Komposisi pasti komisi ini berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik, tetapi mereka terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai dari negara-negara bagian dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan mereka, dan pihak manapun yang penting bagi partai yang bersangkutan. Tetapi, komisi nasional tidak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau mengatur kegiatan para anggota partai. Kedua-dua partai itu juga memiliki komisi kampanye terpisah yang bekerja untuk

memilih calon pada tataran tertentu. Yang paling signifikan dari keduanya adalah komisi Hill committee, yang bertugas untuk memilih para calon bagi masing-masing kamar kongres. Partai-partai dari negara bagian ada di semua negara bagian, meskipun struktur mereka berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan undang-undang negara bagian masing-masing, juga peraturan partai pada tataran nasional dan negara bagian.

Meskipun organisasi-organisasi ini lemah, pemilihan-pemilihan masih digambarkan sebagai perlombaan nasional antar-partai politik. Di dalam sesuatu yang dikenal sebagai "efek mantel", para calon dalam pemilihan presiden menjadi pemimpin de facto bagi masing-masing partainya, dan dengan demikian biasanya menggiring para pendukung yang pada gilirannya akan memilih calon-calon dari partainya untuk memasuki penugasan di pemerintahan. Di pihak lain, pemilihan umum sela federal (yang hanya untuk memilih anggota kongres, dan bukan untuk memilih presiden) biasanya dipandang sebagai referendum (jajak pendapat) terhadap kinerja presiden yang sedang bertugas, di mana para pemilik hak suara memilih mendukung atau tidak terhadap presiden tanpa memandang asal usul partai, yang pada gilirannya membantu sesi kongres berikutnya untuk meluluskan atau menolak agenda presiden. an umum di negara bagian daerah.

- **Perkembangan sistem dua partai di Amerika Serikat**

Sejak dasawarsa 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik ketiga

yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung bertugas dalam artian mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sejatinya diadopsi oleh dua partai politik besar. Pada periode yang berbeda-beda Partai Sosialis, Partai Buruh-Petani, dan Partai Populis selama beberapa tahun memiliki kekuatan lokal yang cukup signifikan, dan kemudian memudar, meskipun di negara bagian Minnesota, Partai Buruh-Petani bergabung menjadi Partai Demokrat lokal Minnesota, yang kini secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh-Petani-Demokrat Minnesota. Kini, Partai Libertarian menjadi partai ketiga yang paling sukses. Negara bagian New York memiliki sejumlah partai ketiga lainnya, yang kadang-kadang memajukan para calon mereka sendiri untuk memasuki penugasan dan kadang-kadang mengajukan calon-calon dari dua partai besar.

Di Distrik Columbia, Partai Kenegerian Distrik Columbia telah berperan sebagai partai ketiga yang kuat mendampingi Partai Demokrat dan Partai Republik.

Sebagian besar anggota dewan di Amerika Serikat dipilih dari distrik-distrik beranggota-tunggal dan memasuki masa penugasan dengan mengalahkan lawan-lawan mereka dalam sebuah sistem untuk menentukan para pemenang yang disebut first-past-the-post (yang pertama lolos, dialah yang menempati penugasan); pihak yang meraih kemenangan kemajemukan, (yang tidak sama dengan kemenangan melalui suara mayoritas). Hal ini menggalakkan sistem dua partai; lihatlah kaidah Duverger. Ketika distrik kongres berkursi-banyak tidak

diterapkan, perwakilan proporsional adalah mustahil dan partai-partai ketiga tidak dapat bertumbuh kembang. Meskipun pemilihan umum menuju senat memilih dua senator untuk setiap konstituensi (negara bagian), terma-terma tergilir secara efektif yang hasilnya adalah konstituensi berkursi-tunggal untuk pemilihan umum menuju senat.

Faktor kritis lainnya adalah aturan akses surat suara (aturan yang menentukan partai politik atau perseorangan muncul dalam surat suara sebagai peserta pemilihan umum). Asalnya, para pemilik suara pergi menuju tempat pemungutan suara dan mengumumkan calon mana yang mereka dukung. Kemudian, hal ini berkembang menjadi suatu proses di mana tiap-tiap partai politik akan membuat surat suara masing-masing dan dengan demikian para pemilik suara meletakkan surat suara partai ke dalam kotak suara. Di penghujung abad ke-19, negara-negara bagian mulai menerapkan Metode Pemungutan Suara Rahasia Australia, dan menjadi standar nasional. Metode pemungutan suara secara rahasia menjamin bahwa kerahasiaan para pemilik hak suara akan dilindungi (yang oleh karenanya tugas pemerintah tidak lagi diperuntukkan bagi pemilik suara yang setia) dan tiap-tiap negara bagian bertanggung jawab akan pengadaan surat suara resmi. Fakta bahwa dewan legislatif negara bagian didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik memberikan partai-partai ini kesempatan untuk meloloskan undang-undang yang mendiskriminasi partai-partai politik kecil, undang-undang sedemikian tidak muncul sampai Ketakutan Merah pertama yang

melanda Amerika se usai Perang Dunia I. Dewan legislatif negara bagian mulai memberlakukan undang-undang/peraturan yang ketat yang mempersulit partai-partai politik kecil mengajukan calon-calon anggota dewan yang mensyaratkan sejumlah besar petisi persetujuan dari masyarakat dan memperpendek waktu sehingga petisi tersebut dapat diedarkan secara sah. Patut untuk diketahui pula bahwa lebih sering dari biasanya, para anggota partai akan "patuh" dan mendukung kebijakan-kebijakan partai mereka, mereka bebas melawan partai mereka sendiri dan menyalurkan suara mereka kepada pihak oposisi ("menyeberang") ketika mereka berkehendak seperti itu. "Di Amerika Serikat label politik yang sama (Demokrat dan Republik) secara virtual meliputi semua pemegang kantor-kantor publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilik suara di manapun digerakkan demi nama kedua-dua partai ini," demikian ujar Nelson W. Polsby, guru besar ilmu politik, dalam buku *New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution*. "Memang Demokrat dan Republik di manapun tidak sama. Variasi-variasi (kadang-kadang nyaris luput, kadang-kadang jelas kentara) dalam 50 budaya politik negara bagian menghasilkan perbedaan signifikan pada semua lini pengertian, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik. Perbedaan-perbedaan ini memberi kesan bahwa seseorang boleh dijustifikasi dalam merujuk sistem dua-partai Amerika, seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar sistem seratus-partai."

- **Spektrum politik dua partai besar**

Pada abad ke-20, seluruh filsafat politik kedua-dua Partai Republik dan Partai Demokrat menjalani pergeseran yang dramatis dari filsafat-filsafat terdahulu mereka. Dari dasawarsa 1860-an sampai dasawarsa 1950-an Partai Republik dianggap cenderung liberal klasik, sedangkan Partai Demokrat dianggap cenderung populis/konservatif klasik. Hal ini mengubah sebuah kesepakatan besar dengan lembaga kepresidenan Demokrat Franklin D. Roosevelt, di mana Kesepakatan Baru menyertakan pembentukan Keamanan Sosial juga sebuah varietas dari pelayanan-pelayanan federal dan proyek-proyek pekerjaan umum lainnya. Kinerja Roosevelt dalam dua krisis yang berdekatan, yakni Kelesuan Besar dan Perang Dunia II mengarah pada semacam pengutuban politik nasional, yang berpusat di sekitar dia; yang pada akhirnya berpadu dengan kebijakan-kebijakannya yang semakin liberal yang menggiring Partai Demokrat menjadi kekiri-kirian sedangkan Partai Republik cenderung kekanan-kananan. Selama dasawarsa 1950-an dan permulaan dasawarsa 1960-an, kedua-dua partai itu menampilkan pendekatan politik yang cenderung ke tengah pada tataran nasional, dan masing-masing partai itu memiliki sayap pengaruh yang berkarakter liberal, moderat, dan konservatif. Sejak dasawarsa 1960-an, sayap konservatif menjadi lebih dominan di dalam Partai Republik, dan sayap liberal menjadi lebih dominan di dalam Partai Demokrat. Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1964 mengabarkan kebangkitan sayap konservatif di pihak Republik. Sayap liberal dan sayap konservatif di

dalam Partai Demokrat saling bersaing sampai tahun 1972, ketika pencalonan George McGovern menandai kemenangan sayap liberal. Hal ini terjadi pula di dalam Partai Republik dengan pencalonannya yang berujung pada kemenangan Ronald Reagan pada tahun 1980, yang menandai kemenangan sayap konservatif. Pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1980, kedua-dua partai besar menjadi semakin dikenali dari orientasi politik yang dominan masing-masing. Unjuk kekuatan pada dasawarsa 1990-an oleh independen reformis Ross Perot mendorong partai-partai besar untuk mengajukan calon presiden yang lebih berorientasi ke tengah, seperti Bill Clinton dan Bob Dole. Pengutuban dalam Kongres, menurut sebagian pihak, telah direkatkan kembali setelah pengambilalihan yang dilakukan pihak Republik pada tahun 1994. Yang lainnya mengatakan bahwa pengutuban ini telah muncul sejak penghujung dasawarsa 1980-an ketika pihak Demokrat menguasai semua kamar di dalam Kongres. Pihak liberal di dalam Partai Republik dan pihak konservatif di dalam Partai Demokrat dan pihak neoliberal Dewan Kepemimpinan Demokrat telah memenuhi peran yang dijuluki sebagai maverick politik (independen), tengah radikal, atau makelar kompromi antara kedua-dua partai besar itu. Mereka juga membantu perolehan dukungan partai mereka masing-masing di wilayah-wilayah tertentu yang barangkali tidak terbiasa untuk memilih anggota partai itu; Partai Republik menggunakan pendekatan ini dengan kaum

tengah Republik seperti Rudy Giuliani, George Pataki, Richard Riordan, dan Arnold Schwarzenegger.

Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2006 mengirimkan banyak kaum tengah atau konservatif Demokrat ke dewan legislatif negara bagian dan federal, termasuk beberapa kejadian perubahan komposisi penguasaan parlemen di beberapa negara bagian, yang paling terkenal adalah Kansas dan Montana.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat:/10/06/2016:jam00.48 WIB.](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat:/10/06/2016:jam00.48_WIB.))

2) Perancis

Pada musim semi tahun 1995 Francois Mitterrand telah menjadi presiden Republik Perancis selama 14 tahun, masa kepemimpinan terlama sepanjang sejarah. Era Mitterrand diawali dengan kemenangan pertama kalinya kaum Kiri dalam pemilihan sejak 1956, dan sebuah komitmen untuk meningkatkan keadilan sosial dan kontrol negara atas pembuatan keputusan ekonomi. Hal ini berakhir dengan sebuah skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan politikus melampauai batas spektrum politik, serangkaian kekalahan dalam pemilihan penting bagi kaum Kiri dan keruntuhan komitmen tradisional yang secara jelas membedakan Kiri, pemilihan Jacques Chirac sebagai presiden, dari Kanan pada abad XX. Dengan berakhirnya era Mitterrand, rakyat lebih merasa yakin pada institusi penting daripada para politikus yang

memerintah mereka. Stabilitas Perancis telah mengejutkan banyak orang perancis dan dunia luar. Dengan menggabungkan dua model pemerintahan demokrasi presidensial dan parlementer, Republik V telah berhasil dalam sebuah eksperimen konstitusi yang sekarang membawa perancis ke arah lebih baik. Untuk pertama kalinya sejak Revolusi Perancis, tidak ada partai politik atau sektor opini publik yang mengalahkan legitimasi rezim. Montesquieu berkata bahwa negara-negara bahagia ketika sejarah negaranya terlalu membosankan untuk dibaca. Kelanjutan dari kebenaran tersebut terbukti dari Perancis yang tidak bahagia karena sejarahnya sangat mengagumkan dan bergejolak. Tidak heran bila sistem politiknya tidak pernah berakhir dan secara berkala mengundang banyak komentar dari orang perancis sendiri dan peneliti asing sejenisnya.

- **Kebudayaan politik**

Warga Perancis secara bersamaan tidak percaya pada otoritas dan sangat membutuhkan individualisme dan persamaan. Sikap ini telah menumbuhkan kepercayaan diri individu yang meyakinkan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan mungkin juga bagi keluarganya. Sebuah pemerintah tangguh disadarkan untuk melawan alam, walaupun harus berpura-pura menjadi progresif. Ketika warga berpartisipasi dalam kehidupan publik, dia berharap untuk melemahkan otoritas pemerintah daripada mendukung perubahan, walaupun ketika perubahannya lambat. Sekarang ini

individualisme telah dinodai dengan anarki. Perancis masih juga mengakomodasi dirinya sendiri lebih mudah keaturan birokrasi. Apa yang terlihat oleh orang luar sebagai instabilitas permanen adalah penggantian regular antara krisis singkat kekerasan dan periode panjang dari rutinitas. Rakyat Perancis menjadi terbiasa untuk berpikir bahwa tidak ada perubahan yang bisa dibawa kecuali oleh sebuah kehebohan utama. Kepercayaan pada institusi telah digunakan untuk merubah perasaan bahwa institusi jauh dari kehidupan sehari-hari rakyat Perancis. Ketika orang Perancis ditanya pada institusi mana mereka lebih menaruh kepercayaan, mereka secara bervariasi memberi rating tertinggi pada pegawai negeri lokal dan organisasi profesional daripada partai politik atau perwakilan nasional lainnya.

- **Partisipasi Politik dan Voting**

Dalam demokrasi kebanyakan, tidak ada bentuk partisipasi politik seluas voting. Walaupun Perancis merupakan negara kesatuan, pemilihan umum diadakan dengan frekuensi yang telah ditentukan pada tiap level teritorial. Wakil untuk Majelis Nasional dipilih setidaknya sekali tiap lima tahun, dan presiden dipilih (atau terpilih kembali) setidaknya sekali tiap tujuh tahun. Sebagai tambahan, pemilihan untuk perwakilan dalam Parlemen Eropa telah diadakan di Perancis, sama halnya seperti tiap negara lain di Komunitas Eropa, tiap lima tahun sekali sejak 1979.

- **Pemilihan Umum Perancis**

Perancis merupakan negara Eropa pertama yang menyelenggarakan sebuah pemilihan umum, dan Perancis juga merupakan negara Eropa pertama yang mendemonstrasikan bahwa sebuah pemilihan umum tidak menghalangi kemungkinan terjadinya pemerintahan otoritarian. Sewaktu Napoleon I dinobatkan menjadi Raja Perancis melalui plebisit, ia menyatakan bahwa ia menganggap kekuasaannya bertumpu semata-mata pada massa. Demikian halnya dengan Napoleon III yang dalam suratnya kepada Majelis Nasional yang ditulis di London 24 Mei 1848, mengatakan bahwa Republik Perancis merupakan hasil revolusi, pebruari dan didasarkan pada pemilihan umum.

- **Partisipasi Politik.**

Sama seperti di negara lain, umur, kelas sosial, dan pendidikan adalah faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilihan. Kelompok yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah, dan kelompok anak remaja dan manula, memiliki hak suara yang lebih sedikit persinya. Sistem pemilihan umum. Pada hari pertama pemilihan hanya kandidat-kandidat terpilih yang mendapat suara mayoritas dari seluruh suara; hal ini relatif jarang terjadi karena terlalu banyaknya kandidat. Dalam proses pemilihan, kandidat yang mendapatkan suara kurang dari 12.5% dari seluruh pemilih akan tereliminasi.

Sebagai hasil, umumnya dua (atau paling banyak tiga) kandidat berhadapan satu sama lain dalam putaran kedua, dimana sebuah pluralitas suara menjamin pemilihan. Sekarang ini,

Front Nasional Perancis telah lebih atau kurang terisolasi dari penyusunan koalisi dengan partai kanan-pusat. Konsekuensinya, pada tahun 1993, dengan syarat terendah 12.5% suara, tidak ada satu pun kandidat mereka yang akhirnya terpilih.

- **Partai Politik**

Beberapa analisis data pemilihan melihat sebuah pembagian Perancis yang kronik kedalam dua keluarga politik besar, masing-masing termotivasi oleh tempramen dan kondisi psikis yang berbeda dan biasanya diklasifikasikan sebagai Kiri dan Kanan. Partai-partai Perancis yang mewakili mayoritas pemilihan melalui periode panjang terbentuk secara internal; oleh karena itu, mereka secara bertahap muncul dari kelompok dalam legislatif. Diantara tahun 1789 dan datangnya era Republik V, Republik Perancis dipegang oleh pemerintah pusat selama hampir 30 tahun. Pada dua atau tiga sistem partai, partai-partai utama biasanya bergerak kearah pusat politik dalam rangka mencapai stabilitas dan kohesi. Di Perancis terdapat banyak partai politik.

Berikut adalah partai-partai politik dan tokoh utama dalam partai tersebut:

- Citizen and Republican Movement (MCR): Jean Pierre CHEVENEMENT

- Democratic and European Social Rally (RDSE): Jacques PELLETIER
- French Communist Party (PCF): Marie-George BUFFET
- Left Radical Party (PRG) nama sebelumnya adalah Radical Socialist Party (PRS)
- dan The Left Radical Movement (MRG): Jean-Michel BAYLET
- Movement for France (MPF): Philippe DE VILLIERS
- National Front (NF): Jean-Marie LE PEN
- Rally for France (RPF): Charles PASQUA
- Socialist Party (PS): Francois HOLLANDE
- Greens (national secretary): Yann WEHRLING
- Union for French Democracy (UDF): Francois BAYROU
- Union for a Popular Movement (UMP) termasuk RPR, DL, dan sebagian UDF.

([Http://dokumen.tips/documents/politik-di-perancis.html:10/06/2016:jam01.08WIB](http://dokumen.tips/documents/politik-di-perancis.html:10/06/2016:jam01.08WIB).)

3) Jerman

Sistem kepartaian Jerman tidak terlalu rumit. Dengan tampilnya Partai Hijau pada dasawarsa 1980-an dan partai penerus Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) setelah reunifikasi, sistem tri-partai yang telah berlangsung lama berkembang menjadi sistem panca-partai

yang kini sudah mantap. Di samping partai-partai berbasis lebar, CDU/CSU dan SPD, partai-partai “kecil” pun mencapai persentase hasilsuara sebesar dua digit dalam pemilihan umum 2009 untuk Bundestag. Kedua partai uni, yang tergolong kelompok partai demokrat Kristen di Eropa, tampil di seluruh Jerman – kecuali di Bavaria – sebagai Uni Demokrat Kristen (CDU). Di negara bagian Bavaria, CDU tidak tampil sendiri dan menyerahkan medannya kepada Uni Sosial Kristen (CSU) yang berhubungan erat dengannya.

Di dalam Bundestag, kedua partai itu membentuk fraksi bersama yang bersifat permanen. Partai Sosialis-Demokrat Jerman (SPD) merupakan kekuatan besar kedua dalam sistem kepartaian Jerman. Di lingkungan Eropa, partai ini tergolong kelompok partai sosialis-demokrat dan sosialis demokratis. CDU/CSU dan SPD bersikap positif terhadap negara sosial. CDU/CSU lebih banyak menampung lapisan pekerja mandiri, tukang dan pengusaha kecil dan menengah. Sedangkan SPD lebih dekat dengan mitra kerja Partai Demokrat Liberal (FDP) terhitung anggota keluarga partai-partai liberal di Eropa. Tujuan pokok politiknya ialah pembatasan campur tangan negara dalam pasaran sampai ukuran sekecil mungkin. Pendukung FDP terutama datang dari lapisan masyarakat yang pendapatannya dan pendidikannya cukup tinggi.

Partai Hijau termasuk kelompok partai berhaluan “hijau” atau ekologis di Eropa. Ciri program politiknya ialah kombinasi antara ekonomi pasar dan tuntutan akan perlindungan alam dan lingkungan hidup yang pemenuhannya harus diawasi oleh negara. Partai Hijau pun lebih banyak mewakili kaum pemilih dari lapisan berpendapatan dan berpendidikan tinggi. Partai Kiri, Die Linke, merupakan yang termuda di antara kekuatan politik yang berarti. Kedudukannya cukup kuat di kelima negara bagian yang bergabung dengan Republik Federal Jerman pada saat reunifikasi. Namun sementara ini di negara bagian lain pun kursi parlemen dipegangnya. Selaku partai yang mencari pendukung dengan menyuarkan tema keadilan sosial, Partai Kiri terutama bersaing dengan SPD.

Christlich Demokratische Union (CDU) Uni Demokratik Kristen Jerman (CDU) adalah partai Jerman dengan account sendiri, itu adalah Partai Kristen-sosialis, liberal dan konservatif nilai-nilai Rakyat dengan pemimpin oposisi Angela Merkel, Kanselir incumbent dari Republik Federal Jerman. Pada tingkat Eropa, CDU adalah anggota Partai Rakyat Eropa (EPP, Partai Rakyat Eropa). CDU adalah jumlah anggota partai terbesar di Jerman. Uni Demokratik Kristen Jerman (“East-CDU”) masuk tahun 1990 ke semua-Jerman CDU. Dengan mitra kerjanya CSU, kelompok CDU parlemen dalam bentuk Bundestag.

Christlich-Soziale Union (CSU) Uni Sosial Kristen (CSU) adalah partai politik Jerman yang didirikan pada tahun 1945 di Bavaria, yang

bersaing hanya ada untuk pemilu. Pemimpin partai adalah Horst Lorenz Seehofer Pada tingkat federal, membentuk di Bundestag Jerman dengan pihak CDU. sebagian kecil (CDU / CSU Kelompok Parlemen), yang akan memberikan kontribusi. Bersama dengan FDP saat pemerintah federal saat ini. Di Bavaria, CSU dengan Horst Seehofer, perdana menteri dan membentuk koalisi dengan FDP sejak 2008. CSU melihat dirinya sebagai partai Kristen konservatif. Pada April 2012, CSU memiliki 150.585 anggota dengan pangsa perempuan 19,3 persen. The CSU adalah partai terbesar ketiga Jerman.

Sozial demokratische Partei Deutschlands (SPD) Partai Sosial Demokrat (SPD) adalah Partai Rakyat Jerman dan partai parlemen tertua diwakili di Jerman. Sejak sesi perdana dari 17 German Bundestag pada tanggal 27 Oktober 2009 itu adalah partai oposisi terbesar di tingkat federal. Dia saat ini terlibat dalam total dua belas negara di pemerintahan, di delapan bundesstaat adalah kepala pemerintahan. SPD adalah partai anggota Partai Sosialis Eropa (PES) dan Sosialis Internasional (SI). Pemimpin partai pada bulan November 2009 adalah Sigmar Gabriel. Freie Demokratische Partei (FDP) Partai Demokrat Bebas (FDP FDP 1968-2001) adalah partai politik liberal di Jerman, yang memiliki gerakan politik pra-Maret. Didirikan pada tahun 1948 oleh mantan anggota DDP dan DVP tersebut. Partai Demokrat Liberal dan NDPD sebagai pihak blok di bekas Jerman Timur, dan Partai Forum Jerman (DFP) dan FDP,

yang berasal dari gerakan hak-hak sipil di GDR, masuk tahun 1990 ke FDP semua-Jerman.

Dengan pemimpin partai adalah Philipp Rösler Partai Demokrat Bebas 1949-1956, 1961-1966, dari tahun 1969 hingga 1998 lagi sejak Oktober 2009, terlibat dalam setiap kasus sebagai mitra koalisi kecil dalam pemerintah federal. Dengan demikian, secara umum lagi dalam pemerintahan daripada Pihak Jerman lainnya. Dia juga saat ini terlibat dalam total empat negara sebagai mitra junior dalam pemerintah. Dia adalah hitam-kuning koalisi di Hesse, Lower Saxony dan Saxony, dengan CDU dan CSU di Bavaria. Die Linke The Linke adalah sebuah partai politik di Jerman, pada tanggal 16 Juni 2007 dibuat dengan menggabungkan. Partai WASG dan Linke. Itu namanya berasal dari klaim orientasi politik kiri dan mencari penggulingan kapitalisme menuju sosialisme demokrasi. Di bagian timur Jerman, partai memperoleh hasil tertinggi pemilu sejauh ini, ada tergantung pada wilayah tersebut. Karakter partai rakyat menempati posisi-posisi kepemimpinan politik di tingkat lokal Dalam Brandenburg, itu terlibat sebagai mitra junior dalam koalisi merah-merah dari pemerintah negara bagian. Dalam Bundestag Jerman dia saat ini terbesar keempat dari lima fraksi dengan 76 dari 620 kursi. Linke adalah pada anggota tingkat Eropa dari Kiri Eropa dan berpartisipasi dalam Forum New Left Eropa (NELF). Pemimpin partai adalah Katja Kipping dan Bernd Riexinger. Bündnis 90/Die Grünen Aliansi 90/The Hijau juga dikenal sebagai Green Alliance atau B'90 /

Hijau) adalah partai politik di Jerman yang utama adalah fokus kebijakan lingkungan. Prinsip politik hijau ekologi, keberlanjutan ekonomi dan sosial. Sejarah Aliansi 90/The Greens memiliki dua akar: Di Jerman Barat dan Berlin Barat yang. Didirikan pada Januari 1980 di Partai Hijau Karlsruhe dari gerakan anti-nuklir dan lingkungan, Gerakan Sosial Baru dan Kiri Baru tahun 1970-an. Dalam pemilihan umum tahun 1983 Partai Hijau untuk Bundestag 1985-1987, ia berhasil dimasukkan ke dalam koalisi merah-hijau di Hesse dengan Joschka Fischer, pertama kalinya seorang menteri negara. Setelah reunifikasi, Partai Hijau gagal dalam pemilihan umum pada tahun 1990 pada rintangan lima persen. Baris kedua pembangunan kembali ke gerakan hak-hak sipil di GDR. Selama pergolakan politik tahun 1989, bergabung dengan Inisiatif untuk Perdamaian dan Hak Asasi Manusia, Demokrasi Sekarang, serta bagian dari Forum Baru untuk Aliansi 90. Ini pergi ke reuni sebagai kelompok Parlemen di Bundestag. Setelah Partai Hijau di GDR telah menyatu segera setelah pemilihan umum pada tahun 1990 Jerman Barat Hijau, menyelesaikan Aliansi 90 dan Hijau ini. Pemimpin partai ini adalah Claudia Benedikta Roth dan Cem Özdemir Setelah re-entry sebagai pecahan di 1994 Alliance 90/The Bundestag Hijau 1998-2005 adalah dalam koalisi merah-hijau untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemerintah federal. Sejak tahun 2005, Aliansi 90/The Greens kembali partai oposisi di parlemen. Pada Pemilu 2009 partai parlemen berhasil dengan pangsa 10,7 persen suara, hasil terbaik yang pernah mereka

dapatkan. Di Baden-Württemberg Aliansi 90/The Greens adalah sejak Mei 2011 dengan waktu Kretschmann Winfried pertama Perdana Menteri, yang memimpin pemerintah negara bagian merah-hijau. Selain itu, Partai Hijau terlibat di tingkat negara menjadi merah-hijau pemerintah di Bremen, Rhineland-Pfalz dan Nord Rhein-Westfalen Utara serta di Schleswig-Holstein. Pemimpin partai ini adalah Claudia Benedikta Roth dan Cem Özdemir. Sistem pemilihan Struktur sistem pemilihan Jerman menyulitkan pembentukan pemerintahan oleh partai tunggal. Hal itu baru terjadi satu kali selama 56 tahun. Biasanya terjadi persekutuan antarpartai. Agar para pemilih mengetahui siapa mitra partai pilihan mereka kelak, umumnya masing-masing partai menetapkan sebuah “pernyataan koalisi” sebelum memulai kampanye pemilihan. Jadi, dengan memberikan suara kepada salah satu partai, pemilih mengungkapkan preferensinya untuk persekutuan partai tertentu, dan juga menentukan perbandingan kekuatan di antara para mitra dalam pemerintahan yang diinginkannya.

Politik Luar Negeri Dalam era globalisasi, politik luar negeri telah berubah menjadi politik dalam-negeri sedunia. Negara-negara, masyarakat dan kawasan perekonomian membentuk jaringan. Dengan berakhirnya konflik Timur-Barat, politik luar negeri Jerman memperoleh peluang baru, baik di Eropa maupun di seluruh dunia. Sejalan dengan perubahan yang terjadi di gelanggang politik dunia, tanggung jawab internasional Jerman meningkat. Jerman menerima tanggung jawab itu dan dengan bekerja sama dengan mitra-tranya

di seluruh dunia – berupaya sungguh-sungguh demi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan dialog antarbudaya. Tujuan utama politik luar negeri Jerman ialah pelestarian perdamaian dan keamanan di dunia. Menjelang akhir tahun 60-an, khususnya sejak jabatan kanselir dipegang oleh Willy Brandt (tahun 1969-1974), prinsip dasar politik luar negeri tersebut dilengkapi dan dikembangkan terus melalui politik peredaan ketegangan dengan Polandia dan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa Timur dan bagian timur Eropa Tengah. Namun dasar politik luar negeri Jerman yang telah dikembangkan terus oleh semua pemerintah federal ialah integrasi Jerman ke dalam struktur kerja sama multilateral di segala bidang. Integrasi itu sejalan dengan sikap negara-negara tetangga; setelah pengalaman pahit dua kali perang dunia, mereka berkeinginan keras untuk mengintegrasikan dan mengontrol orang Jerman supaya tidak bertindak sepihak lagi. Aspek lain yang mendukung kebijakan integrasi itu ialah kemauan masyarakat Jerman sendiri yang mendambakan perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan demokrasi, dan yang menyadari bahwa integrasi negaranya menjadi prasyarat bagi reunifikasi Jerman. Dasawarsa 1990-an mengawali masa penuh tantangan luar biasa bagi Jerman Bersatu. Di satu pihak perlu ditanggulangi situasi baru di dalam negeri. Pada waktu yang sama Jerman menghadapi peran baru yang belum biasa di bidang politik luar negeri. Itulah satu sisi perkembangan. Ada segi lain Reunifikasi Jerman jelas berlawanan arah dengan kecenderungan umum di dunia yang

berupa peleburan, keruntuhan atau juga penghancuran. Dengan berakhirnya eksistensi Uni Sovyet, Yugoslavia dan Ceko-slovakia, begitu juga dengan pembongkaran negara Etiopia, Somalia dan Sudan yang untuk sebagian dilakukan dari dalam, untuk sebagian dari luar, – untuk menyebutkan beberapa contoh saja – jumlah pemeran aktif meningkat dengan tajam, walaupun tidak semua pemeran tersebut berupa negara yang diakui. Dampak lain, semakin sering terjadi situasi menghangatnya persoalan politik yang sangat rumit.

Oleh situasi seperti itu, kebijakan Jerman di bidang politik luar negeri, keamanan, perekonomian dan keuangan, tetapi juga di bidang kerja sama pembangunan dan lingkungan hidup dihadapkan dengan tantangan yang tiada taranya di masa lalu, karena situasinya ditimbulkan oleh konstelasi konflik yang berbeda-beda: Konflik etnis dan keagamaan, persoalan perbatasan dan sumber daya alam, keadaan darurat di bidang pangan dan hygiene sering kali saling terkait sehingga membentuk kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan kekuatan sendiri. Pada akhir dasawarsa pertama abad ke-21, di Afrika saja terdapat 16 juta pengungsi dan orang yang diusir di dalam negeri sendiri. Dalam penanggulangan problem seperti itu, orang Jerman diharapkan berperan aktif, sebab Jerman tidak hanya tergolong negara yang cukup berada, melainkan juga sejarahnya sebagai negara penjajah relatif singkat dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lainnya. Lagi pula sejarah tersebut telah berakhir dalam Perang Dunia I. Dengan demikian Jerman

merupakan mitra yang dicari dalam kerja sama ekonomi dan pembangunan. Dengan sumbangan sebesar 14 miliar dolar AS per tahun, Jerman merupakan donor terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan sebelum Inggris, Perancis dan Jepang.

<https://sulaimansaid.wordpress.com/2013/12/21/sistem-politik-di-jerman-2/:10/06/2016:jam01.19WIB>.

Partai-Partai Di Negara Jerman

1. Partai-partai besar yang ada saat ini.

a). Christlich demokratische Union (CDU)

Ketua: Ny. Angela Merkel

Partai yang lahir pada tahun 1945 dan menyatakan dirinya sebagai partai rakyat yang mencakup masyarakat dengan perbedaan kepercayaan dan berjuang untuk semua kelompok masyarakat. Politik partai CDU berdasarkan pada pemahaman kekristenan manusia dan tanggung jawabnya dihadapan Tuhan. Program dasar CDU adalah menganut nilai-nilai kebebasan, solidaritas dan keadilan dengan berpegang pada prinsip etika kekristenan, perekonomian sosial serta keterikatan pada dunia Barat.

b). Christlich Soziale Union (CSU)

Ketua: Edmund Stoiber Partai CSU adalah adik partai CDU yang lahir pada tahun 1945 dan merupakan partai politik yang berperan di wilayah negara bagian Bayern (Bavaria). Partai CSU memegang prinsip tradisi keagamaan (kristen) serta berjuang untuk semua lapisan masyarakat dan golongan sosial yang demokratis. Partai CSU adalah partai yang konservatif, liberal dan sosial. Di dalam Bundestag (Parlemen) partai CDU dan CSU menyatukan diri dalam satu fraksi CDU/CSU.

c). Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Ketua: Gerhard Schroder

Partai SPD adalah partai yang tertua di RFJ, yang muncul dari sisa-sisa partai buruh pada masa pemerintahan Republik Weimar dan selanjutnya pada masa Hitler memegang kekuasaan pada tahun 1933. Pada awalnya partai SPD memperjuangkan nasib pekerja/buruh, namun dewasa ini SPD merupakan partai rakyat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi kepada kesejahteraan umum serta mengadakan reformasi sosial.

d) Freie demokratische Partei (FDP)

Ketua: Dr. Wolfgang Gerhardt

Partai FDP lahir pada tahun 1948 dan menyatakan dirinya sebagai partai liberal yang pernah hidup di Jerman pada tahun 1933. Sampai

tahun 1970-an partai FDP ini merupakan partai kekuatan ketiga yang selalu turut dalam pemerintahan sebagai partner koalisi. Fungsi ini kemudian terhapuskan oleh keberadaan partai Die Green pada awal tahun 80-an.

e) Bndnis 90 I Die Green

Ketua: Ny. Antje Radcke, Ny. Gunde Rostel

Partai ini lahir dari suatu gerakan kelompok pencinta alam, penentang penggunaan tenaga atom dan kelompok pasific yang aktif pada tahun 1980-an. Partai Die Green merupakan satu partai alternatif terhadap partai-partai besar lainnya yang sudah mapan. Dia Green berpendapat bahwa kehidupan peradaban dunia sudah mencapai titik kritis sehingga perlu diadakan penanganan dan pemikiran baru dalam menerapkan politik, selanjutnya penghormatan HAM dan penerapan demokrasi adalah merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara.

f) Partai Demokratische Sozialismus (POS)

Ketua: Prof: Dr. Lothar Bisky

Partai PDS adalah penerus partai tunggal di Jerman Timur (SED) yang merupakan organ pemerintah, penguasa tunggal. Setelah unifikasi Jerman, partai SED bubar dan muncul partai PDS. Pada dasarnya PDS memegang prinsip demokrasi-sosial yang bergerak di wilayah negara

bagian Jerman sebelah timur karena di wilayah negara bagian sebelah barat partai PDS ini tidak populer dan dianggap sama dengan partai SED. Di samping itu terdapat partai-partai kecil yang beroperasi di wilayah-wilayah tertentu saja dan partai-partai yang berhaluan kanan ataupun kiri

2. Partai yang berhaluan kanan radikal

Dalam tahun 1999 mulai terlihat perkembangan partai-partai yang berhaluan kanan. Dalam pemilihan tingkat pusat kelompok radikal kanan (Reps, DVU) tidak berhasil mencapai tujuannya. Ternyata keberhasilan partai DVU (Deutsche Volks Union) di negara bagian Sachsen-Anhalt bukan merupakan batu loncatan dalam pemilihan tingkat pusat.

Di dalam partai-partai yang berhaluan kanan sering terdapat pertentangan pendapat sehingga penerapan politik praktis tidak dapat mempunyai basis yang baik dan dimengerti masyarakat. Pada umumnya di dalam partai-partai ini emosi lebih diutamakan dari pada pemikiran dan strategi politik yang matang. Partai-partai yang berhaluan kanan kebanyakan mempunyai hubungan dekat dengan kelompok Skinheads yang menghalalkan kekerasan dan bersikap anti orang asing. Beberapa partai yang berhaluan kanan:

- a) Die ReDublikaner (REPS)

Ketua: Dr. Rolf Schliere

b) DVU (Deutsche Volks Union)

Ketua: Dr. Gerhard Frey

c) NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland)

Ketua: Udo Voigt

d) Junge Nationaldemokrate (IN)

Ketua: Holger Apfel

3. Partai berhaluan kiri

Kebanyakan partai-partai yang berhaluan kiri mendapat dukungan dari kelompok pemotres. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya partai-partai kiri mengadakan hubungan kerjasama. Dalam pemilihan pada tanggal 28 September 1998 partai DKP (Deutsche Kommunistische Partei) mendukung partai PDS. Beberapa partai yang berhaluan kiri:

a) Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ketua: Heinz Stehr

b) Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS NRW)

c) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland (MLPD)

Ketua Stefan Engel

4. Organisasi Massa

Disamping partai-partai, di RFJ terdapat organisasi massa yang pada umumnya berorientasi pada partai politik yang sealian. Organisasi tersebut adalah:

1. Gabungan Serikat Buruh (Deutscher Gewerkschaft Bund)
2. Gabungan Pengusaha Jerman (Deutscher Arbeitgeber Verband)
3. Asosiasi Guru Jerman
4. Organisasi Pemuda Sosialis
5. Organisasi Pemuda Kristen Jerman
- 5) Organisasi Radikal Kiri.

Aktivitas organisasi radikal kiri anarkis pada tahun 1999 tidak bertambah. Tujuan dari pada organisasi-organisasi kiri radikal ini adalah perubahan sistem kapitalisme, lebih memperhatikan nasib kaum buruh sebagai pilar pendukung kemasyarakatan. Aksi yang bersifat

terorisme adalah berupa aksi pemboman, aksi pembakaran dan merusak bangunan. Kelompok ini adalah antara lain:

- a) Anti Imperialistische Zelle (AIZ)
- b) Rote Armee Fraktion (RAF)
- c) Revolutionare Zellen (RZ) I Rote Zora

5. Organisasi Warga Asing

Kebebasan untuk berorganisasi dan mengemukakan pendapat dan berpolitik di RFJ digunakan sebagai peluang oleh para pelarian warga asing melanjutkan kegiatan politiknya melawan penguasa di negeri asalnya. Beberapa dari organisasi-organisasi ini diawasi oleh dinas keamanan Jerman karena dinilai sangat progresif, radikal dan membahayakan. Beberapa organisasi radikal asing di RFJ adalah:

- a) ICCB (Persatuan Kekeluargaan Islam)

Ketua: metin Kaplan

- b) IGMG (Islam Toplumu Milli Gorus)

Ketua: Ali Yuksel

- c) DHKP-C (Front Pembebasan Rakyat)

Ketua: Dursun Karatas

d) PKK (Partai Buruh Kurdi)

Ketua: Abdullah Ocalan

e) FIS (Front Islam)

FIS muncul di RFJ pada tahun 1989 ketika pemerintah Aljazair melaksanakan liberalisasi kepartaian. Di RFJ FIS mempunyai anggota sebanyak 300 orang dan berkedudukan di Koln dan Aachen

f) GIA (Front Islam dan grup Bersenjata Islam) GIA adalah pecahan dari FIS. Berdiri sendiri sejak tahun 1991.

g) IBP (Persatuan Islam Palestina) Dibentuk pada tahun 1982 sebagai anak organisasi HAMAS dan beranggota sebanyak 200 orang

h) Hizb-Allah Dibentuk pada tahun 1982 di Libanon atas inisiatif Iran mempunyai anggota di RFJ sebanyak 700 orang

i) U.I.S.A (Union Pelajar Islam di Eropa) Berkedudukan di Berlin dan mempunyai anggota sebanyak 200 orang. Organisasi U.I.S.A dekat dengan pemerintah Iran.

j) NWRI (dewan Nasional Perlawanan Iran) Berkedudukan di Koln dan mempunyai anggota sebanyak 330 orang

k) LPK (Gerakan kemerdekaan Rakyat Kosovo) Didirikan pada tahun 1982 di Kosovo dan mempunyai anggota sebanyak 400 orang

l) LTTE (Liberation Tigers of Tamil Ealam) Didirikan pada tahun 1972 berkedudukan di Monchengladbach dan mempunyai anggota sebanyak 240 orang

(m) BK dan ISYF Dibentuk tahun 1984 berkedudukan di Frankfurt/Main, anggota 200 orang.

(<https://ririn1508.wordpress.com/tag/partai-partai-di-negara-jerman/>:10/06/2016:jam01.35WIB.

4) Jepang

Eksistensi Partai Politik di Jepang sudah dimulai sejak era Restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1868. Program Iwakura Shisetsudan atau Misi Iwakura yang diketuai oleh Iwakura Tomomi dalam rangka mempelajari sistem pemerintahan dan ekonomi di negara-negara Barat pada tahun 1871-1873 membuahkan reformasi politik yang melahirkan partai politik – atau pseudo-partai politik – pertama di Jepang, yaitu Aikoku Koto pada tahun 1874 oleh Itagaki Taisuke dalam rangka menjalankan jiyu minken undo atau ‘Gerakan untuk Kebebasan dan Hak Rakyat’. Perkembangan ini terus mengalami kemajuan pada saat Jepang memasuki era demokrasi Taisho (1912-1926) ketika partai-partai mulai bermunculan dan mengikuti pola partai-partai modern yang

berkembang pesat di negara-negara Barat, khususnya Inggris Raya dengan sistem demokrasi parlementernya. Model ini cukup terkenal dalam basis masyarakat Jepang, mengingat kiprah partai berbasis massa, dukungan sosial dan prinsip yang jelas. Selama periode ini, acapkali parlemen didominasi oleh Rikken Seiyukai, partai terbesar di Jepang pada masa itu dengan oposisi terbesar Rikken Minseitō. Mengingat gelombang demokrasi di Jepang memiliki pola pasang-naik dan pasang-surut sejak Restorasi Meiji hingga pasca-pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat, peranan partai politik dalam tatanan pemerintahan di Jepang juga mengalami hal yang serupa.

Sejak diberlakukannya konstitusi baru pada tahun 1947, terdapat tiga partai besar yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum, yaitu Partai Liberal (Jiyūtō), Partai Sosialis (Shakaitō) dan Partai Demokrat (Minshūtō). Pada tahun 1955, dua partai berhaluan konservatif kanan, Jiyūtō dan Minshūtō, melebur menjadi satu partai yang dominatif hingga tahun 1993, Partai Demokrat Liberal (Jiyū Minshūtō, Jimintō, Liberal Democratic Party atau LDP). Sejak periode ini, dikenal istilah Sistem 1955 (gojūgonen taisei).

Sistem Pemilihan Umum Tahun 1955

Sebuah sistem yang mengatur partai politik atau sistem partai di dalam sebuah negara dapat didefinisikan sebagai pola organisasi, identitas pemilih, dan sekumpulan kebijakan elektoral yang memiliki karakteristik dan hasilnya yang membuatnya berbeda dengan sistem partai yang lain. Berangkat dari definisi ini, sistem partai politik di Jepang mungkin dapat dinyatakan memiliki keunikan dan karakteristiknya tersendiri. Keunikan dan karakteristik dari sistem partai politik di Jepang lebih kepada langkah partai agar dapat sedemikian dominan di dalam percaturan politik Jepang.

Dominasi LDP di dalam dinamika politik di Jepang memang tidak dapat dilepaskan dari sistem partai politik tahun 1955. Sistem ini mengatur kehidupan politik Jepang pasca-Perang Dunia Kedua. Pendudukan Amerika Serikat di Jepang pasca-Perang Dunia Kedua memang memiliki dilemanya tersendiri. Dilema ini khususnya berhubungan dengan kehidupan politik Jepang yang harus menjadi sangat bergantung dengan keinginan politik Amerika Serikat di negaranya dan wilayah Asia Timur dan Tenggara secara keseluruhan. SCAP dan GHQ ketika itu melarang semua anggota parlemen petahana di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua untuk kembali menduduki posisinya. Hal ini menciptakan sebuah peta politik yang kembali menjadi sangat mentah dan mementalkan kekuatan politik terdahulu di Jepang. Pemilu pertama pasca-Perang Dunia Kedua diikuti hingga 267 partai politik.

Sebenarnya

tidak ada perubahan sistem partai politik di Jepang antara era sebelum dengan sesudah Perang Dunia Kedua, mengingat sistem partai politik Jepang sudah menjadi rigid sejak era Demokrasi Taisho. Hal ini merupakan akibat dari tidak dapat terbentuknya konsensus dalam menentukan sistem partai politik yang ideal di masa pendudukan Amerika Serikat, sehingga sistem pemilihan umum yang digunakan masih menggunakan sistem partai politik yang lama. Akan tetapi yang membuat tahun 1955 menjadi sangat penting adalah terbentuknya kekuatan dua partai di Jepang pada tahun itu. Kekuatan dua partai inilah yang sebelumnya belum pernah terjadi di Jepang bahkan di era sebelum Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya Jepang memang merupakan sebuah negara multi-partai, namun dua partai ini merupakan partai politik yang paling dominan saat itu. Di dalam sistem pemilihan umum tahun 1955, kebijakan elektoral yang digunakan ialah penggunaan metode single non-transferable vote (SNTV). Penggunaan metode ini berarti di dalam setiap distrik sebuah partai politik diharuskan untuk mencalonkan lebih dari satu calon. Pemilihannya akan sangat difokuskan kepada pemilihan calon-calon individu ini ketimbang kepada partai politik itu sendiri. Banyak pengamat yang beranggapan partai LDP sangatlah diuntungkan dengan sistem ini dikarenakan posisi partai ini sebagai pemerintah sangat memudahkan bagi anggota-anggotanya dikenal oleh masyarakat Jepang

ketimbang partai Sosialis yang kurang dikenal individu-individu anggotanya.

Kiprah Dominan LDP Sebelum 1993

Melalui sistem yang telah berlangsung sejak tahun 1955, LDP memiliki kemampuan sebagai partai yang hegemonik dalam tatanan pemerintahan Jepang selama 38 tahun, sebelum akhirnya dikalahkan melalui koalisi partai-partai lawan yang berhasil meraih kursi mayoritas pada tahun 1993, ditambah skandal-skandal yang mencoreng nama baik LDP sebagai partai yang sukses mengangkat Jepang dari ‘puing-puing’ sisa Perang Dunia kedua. Kiprah LDP selama 38 tahun di pemerintahan Jepang yang sangat dominatif ini acapkali membuat istilah baru yang dinamakan *ichi to-ni bun’no ichi seito-sei* (sistem satu-setengah partai), mengingat hasil perolehan suara yang didapatkan oleh LDP tidak dapat ditandingi oleh partai lain, meskipun sudah berkoalisi, dan hanya menghasilkan setengah dari hasil suara LDP.

Hal ini juga didukung oleh sistem SNTV yang mampu menjadikan partai-partai diluar LDP menjadi kurang dominan selama 38 tahun. Di sisi lain, LDP telah membentuk sebuah jaringan kuat yang dinamakan *tetsu no sankaku chitai* atau segitiga besi yang dihuni oleh partai berkuasa LDP dengan keiretsu (pebisnis) dan birokrasi sebagai penopangnya. Hegemonic party system atau one-party dominant system akhirnya tercipta di dalam pola politik Jepang. Hegemonic party system

tercipta ketika ada satu partai politik yang berhasil memenangkan hampir seluruh atau bahkan seluruh pemilihan umum yang telah diselenggarakan suatu negara dalam kondisi yang kompetitif. Dalam kasus perpolitikan di Jepang, Partai Liberal Demokrat yang berdiri dari fusi antara dua partai konservatif, Partai Liberal dan Partai Demokrat pada tahun 1955, berhasil menguasai pemerintahan selama 38 tahun dengan cara yang legitimatif, setidaknya dalam perspektif demokrasi.

Meskipun LDP merupakan partai yang berkuasa sangat lama dan berpengaruh sangat kuat dalam setiap langkah politis, ekonomis, diplomatis dan bahkan kulturalis Jepang, LDP tidak pernah memperoleh suara yang menjadikannya memiliki dua-per-tiga kursi di parlemen, sehingga tidak sedikit dari rancangan kebijakan LDP yang diveto oleh oposisi di dalam parlemen.

Meskipun demikian, perkembangan politik Jepang ekivalen dengan kiprah LDP yang mengakar kuat di dalam struktur pemerintahan, pebisnis dan masyarakat Jepang pada umumnya.ada beberapa faktor yang mendukung progresivitas dan agresivitas LDP untuk memperoleh peranan yang dominan dalam pemerintahan Jepang sejak tahun 1955, faktor-faktor yang akan dibahas dalam reviu ini antara lain sebagai berikut:

1. Peranan koenkai dalam menyokong perolehan suara LDP;
2. Peranan habatsu dari legislator;

3. Peranan seimu chosakaicho sebagai badan perumusan kebijakan yang dikeluarkan LDP; dan
4. Peranan zoku-giin sebagai think-tank dari kebijakan-kebijakan yang berperan aktif untuk menjadi penyangga kekuasaan LDP.

Koenkai adalah organisasi yang menjadi pendukung personal kandidat yang akan menduduki kursi pemerintahan yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap LDP. Ada perbedaan antara proporsi koenkai perkotaan dengan perdesaan, khususnya dalam hal dukungannya terhadap LDP. Di wilayah perdesaan, dukungan terhadap LDP hampir mencapai 70% lebih tinggi daripada di wilayah perkotaan. Keunikan dari perilaku pemilih dalam koenkai adalah adanya kemungkinan pemilih tidak pro-LDP dan memilih partai lain, namun tetap memilih kandidat yang berasal dari LDP, khususnya pertahana, yang dinilai memberikan manfaat dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, tanggul dan sebagainya. Tentu saja pada akhirnya koenkai menjadi alat untuk mobilisasi pemilih secara pragmatis dan menopang kekuasaan LDP untuk waktu yang cukup panjang. Semenjak amandemen sistem pemilihan umum dan partai politik pada tahun 1994, peranan koenkai menjadi sejenis cabang dari partai-partai yang ada dalam perpolitikan Jepang, meskipun masih mampu memobilisasi pemilih hingga kurang-lebih satu dekade ke depan sebelum pemilihan umum tahun 2009 yang menjadikan Partai

Demokrat (Minshuto atau DPJ) sebagai partai pemenang pemilihan umum.

Di sisi lain, terdapat *habatsu* yang merupakan faksi dari partai-partai yang khusus dalam hal ini adalah faksi eksklusif yang dimiliki oleh LDP sebagai partai terbesar di Jepang. Sebelum tahun 1994, faksi memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menentukan calon presiden partai yang sudah barang tentu menjadi perdana menteri. Pemilihan calon presiden dapat dilakukan dengan cara nominasi yang didasarkan pada dua faktor penting, yaitu pemilihan langsung dan politik uang. Hubungan antara faksi dengan *koenkai* tidak terlalu signifikan karena adanya peranan yang sangat kuat dari pebisnis yang dapat memberikan bantuan dana secara langsung dalam jumlah yang lebih besar. Dalam regulasi kampanye yang telah diperbaharui, kontribusi dari segala organisasi yang dapat ditujukan untuk memobilisasi calon tertentu dilarang. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi korupsi yang sangat marak dan akut di dalam tubuh LDP dan birokrasi. *Habatsu* dalam LDP sendiri dibagi atas sembilan bagian utama – di luar beberapa faksi lain yang tidak terafiliasi di dalam sembilan faksi ini – yaitu sebagai berikut:

1. Seiwa Seisaku Kenkyūkai (Seiwa Political-analysis Council)
(Faksi Machimura)
2. Heisei Kenkyūkai (Heisei Research Council) (Faksi Tsushima)

3. Shisuikai (Commander Plan Association) (Faksi Ibuki)
4. Kōchikai (Large Reservoir Association) (Faksi Koga)
5. Kōchikai (Faksi Tanigaki)
6. Kinmirai Seiji Kenkyūkai (Research for Politics of the Near Future) (Faksi Yamasaki)
7. Banchō Seisaku Kenkyūjo (Bancho Policy-analysis Institute) (Faksi Komura)
8. Ikōkai (Isamu Hiroshi Committee) (Faksi Kono)
9. Atarashii Nami (New Wave) (Faksi Nikai)

Peranan seimu chosakaicho juga menjadi salah satu penunjang dari kiprah LDP selama perjalanannya. Seimu chosakaicho adalah badan yang berfungsi sebagai perumus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai yang diajukan di dalam parlemen. Badan ini acapkali menyediakan jasa sebagai ahli dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kelompok kepentingan dan pejabat terkait.

Begitu pula dengan zoku-giin, yang secara harafiah diartikan sebagai policy-tribe, badan ini berfungsi sebagai pemikir kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh parlemen, khususnya yang dipimpin oleh LDP, agar dapat terus berjalan sesuai haluan partai. Keanggotaan zoku-giin dapat dipilih melalui kerja-kerasnya dalam pembendaharaan kebijakan, sehingga tertutup kemungkinan untuk anggota legislatif baru untuk menjadi bagian dari zoku-giin. Pada tahun

2006, keanggotaan zoku-giin berjumlah 128 dengan 36 orang yang berasal dari sangi-in dan 92 orang yang berasal dari shugi-in. Di dalam ziku-giin terbagi lagi atas 12 disiplin kebijakan, yaitu kabinet; internal dan komunikasi; keamanan; yudisial; luar negeri; keuangan; edukasi, kultur, olahraga, sains dan teknologi; kesehatan, buruh dan kesejahteraan; pertanian, perikanan dan kehutanan; ekonomi, perdagangan dan industri; pertanahan, infrastruktur dan transportasi; dan yang terakhir isu lingkungan.

Kemunduran Dominasi LDP dan Reformasi Sistem Pemilihan Umum Tahun 1993

Dimensi politik yang sangat memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi, ternyata memiliki dampak buruknya bagi LDP. Kemajuan ekonomi di Jepang di masa 1960-1980an ternyata telah membawa banyak elit politik LDP menjadi korup dan banyak melakukan persekongkolan dengan kalangan pengusaha. Kebiasaan para elit politik LDP ini mulai terlihat dengan jelas oleh masyarakat Jepang pada tahun 1980an yang mulai mendorong keinginan masyarakat untuk tidak lagi mempertahankan dominasi LDP di dalam kokkai. Masyarakat Jepang yang sebelumnya bersifat konservatif dan mengedepankan status-quo, kini berubah dan mendukung adanya reformasi dan berakhirnya dominasi LDP.

Kecurigaan masyarakat semakin menjadi-jadi ketika terbongkarnya skandal-skandal yang menyangkut anggota-anggota LDP. Merosotnya

dominasi LDP mulai menjadi kenyataan pada tahun 1989 di saat kekalahan LDP pada pemilihan majelis tinggi di parlemen. Pada tahun ini pula partai Sosialis Jepang mulai merestrukturisasi sistem internalnya. Puncaknya pada tahun 1993 LDP untuk pertama kalinya tidak mampu meraih kursi lebih dari empat puluh persen di kokkai. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya faksi-faksi yang terdapat di dalam LDP. Jadi dapat dilihat bagaimana ketika Shakai Minshuto mulai memperkuat struktur internalnya, justru LDP yang jatuh menuju jurang perpecahan di antara habatsu-habatsu yang ada.

Habatsu-habatsu yang ada di dalam LDP ini pun perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Perpecahan di dalam LDP terbukti di kala pasca-pemilihan umum tahun 1993, menghasilkan tiga partai politik baru yang dibentuk oleh para anggota-anggota LDP terdahulu. Partai-partai tersebut adalah Shinshintō (New Frontier Party atau NFP, yang pada tahun 1998 menjadi Minshuto atau DPJ), Shinseitō dan Shintō Sakigake.

Reformasi Pemilihan Umum Jepang

Reformasi pemilihan umum di Jepang banyak dinyatakan sebagai bentuk kejenuhan rakyat dan partai politik di Jepang dengan dinamika politik yang sangat statis dengan hanya satu partai dominan LDP. Kejenuhan ini apalagi disebabkan oleh banyaknya tindak korupsi yang dilakukan oleh para elit pemerintahan yang dipimpin oleh LDP.

Berubahnya peta kekuatan partai politik di Jepang kemudian mulai memunculkan ide untuk mereformasi sistem partai politik di Jepang. Meskipun LDP masih merupakan pemegang kursi mayoritas dan pemimpin koalisi pemerintahan pasca-pemilhan umum tahun 1993, posisi LDP sudah semakin melemah dan kemudian menjadi tidak berdaya dalam menolak tuntutan untuk mereformasi sistem partai politik. Akhirnya, pada tahun itu pula shugi-in kokkaimeloloskan berbagai undang-undang untuk mereformasi sistem pemilihan umum.

Sistem yang baru ini memiliki tiga tujuan utama yaitu, mengurangi biaya kampanye dan kemungkinan terjadinya korupsi, menggantikan sistem pemilihan yang individu-sentris menjadi partai-sentris, dan juga untuk menciptakan alternatif baru di dalam sistem parlementarian Jepang. Jika melihat dari tujuan yang hendak dibawa, implikasi yang akan terjadi tentu dapat ditebak akan mengubah metode pemilihan umum menjadi lebih terpusat kepada posisi partai politik. Reformasi di dalam metode pencalonan di dalam pemilihan umum memang terjadi, namun tidak sepenuhnya reformasi ini terjadi. Dengan berbagai macam kompromi politik dengan banyak kekuatan-kekuatan partai politik, akhirnya sistem yang dipilih ialah memperkecil wilayah kandidat meskipun tetap bersifat individual (Single-member District atau SMD) dan menambahkan satu jenis pencalonan lagi yaitu perwakilan proporsional yang ditujukan untuk terbentuknya kelompok oposisi yang

baik. Sistem ini disebut mixed member sistem yang meletakkan kekuatan pencalonan untuk dipecah menjadi dua bentuk.

Dalam perjalanannya, sistem ini berhasil mengurangi dominasi LDP dan memperkuat posisi oposisi di Jepang. Hasil pemilihan umum sejak pemilihan umum tahun 1993 hingga 2009 juga membawa LDP tidak pernah lagi mencapai hasil di atas empat puluh persen pada pemilu majelis rendah hingga kini. Posisi oposisi yang kuat ini kemudian terbukti mampu membuat dinamika politik di Jepang menjadi sangat dinamis dan seringkali berhasil menjatuhkan paraperdana menteri dari LDP. Hingga pada akhirnya pada tahun 2009, DPJ, partai politik oposisi paling kuat mampu memenangkan pemilihan umum dan menjadi partai berkuasa.

Posisi ini memang membuat partai politik menjadi sangat rentan dengan posisinya, namun kondisi ini justru juga membawa dampak positif dengan semakin memperkuat posisi kepengurusan pusat partai dan melemahkan faksi-faksi yang ada. Melemahnya faksi-faksi tersebut juga didorong oleh semakin bersatunya faksi-faksi yang ada di dalam setiap partai politik. Apalagi kehadiran sistem SMD dan Proportional Representation (PR) di dalam sistem pemilihan umum 1993, telah mempersulit munculnya pengaruh habatsu di dalam setiap pemilihan umum.

Dampak reformasi sistem pemilihan umum ini juga mempengaruhi tingkatan anggota parlemen yang terpilih kembali. Meskipun dengan

sistem 1955, tingkatan anggota parlemen yang terpilih kembali sudah tinggi dengan tingkatan 82%, setelah reformasi dilaksanakan tingkatan ini justru lebih meningkat. Dapat dimengerti fenomena ini disebabkan oleh metode SMD dan PR yang berusaha memperkuat posisi partai politik ketimbang individu yang pada gilirannya membawa partai politik juga semakin mempertahankan elit-elitnya untuk tetap duduk di parlemen. Dengan implikasi ini, pemerintahan koalisi pun semakin sering terjadi pasca-reformasi sistem pemilu 1993 bila dibandingkan sebelum 1993.

Ditinjau dari faktor historis, perjalanan demokrasi di Jepang sudah berjalan seiringan dengan Restorasi Meiji itu sendiri. Kerap kali demokrasi di Jepang dihambat oleh militeristik, sebelum akhirnya ‘dilindungi’ oleh konstitusi baru, Heiwa Kenpo, yang menjanjikan demokrasi yang tidak akan terinterupsi. Akan tetapi, bukan berarti tidak terdapat oligarkisme di dalam masyarakat Jepang, karena ‘segitiga besi’ yang dihuni oleh partai berkuasa, LDP dengan birokrasi dan pebisnis sebagai penopang menjadikan partai-partai oposisi dikerdilkan selama tiga dekade lebih. Perubahan kini telah terlihat di Jepang sejak kekalahan LDP, namun kita mungkin tidak dapat berharap bahwa segitiga besi ini akan hilang, karena di dalam negara yang menghargai harmonitas dan hierarki sosial, kasus semacam itu tidak akan mudah hilang dalam masyarakat.

Menjadi sebuah perjalanan yang unik bagi negara di demokrasi di dunia ketika sebuah partai berkuasa lebih dari tiga dekade tanpa interupsi. Kasus semacam ini juga tidak menjadi monopoli bagi negara-negara Asia saja, mengingat kasus serupa juga terjadi di Italia dan Israel. Dengan kekalahan LDP pada pemilihan umum tahun 1993, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sistem perpolitikan dan pemilihan umum di Jepang. Meskipun demikian, LDP juga masih berkuasa selama satu dekade ke depan, meskipun harus berkoalisi, sebelum akhirnya terkalahkan oleh DPJ yang berhasil memenangkan pemilihan umum tahun 2009 atas hasil dari resesi ekonomi yang menimpa Jepang sebagai salah satu negara industri maju di dunia ([Http://Hokonglim.Blogspot.Co.Id/2012/01/Partai-Politik-Dan-Pemilihan-Umum-Di.Html:10/10/2016:Jam01.52wib](http://Hokonglim.Blogspot.Co.Id/2012/01/Partai-Politik-Dan-Pemilihan-Umum-Di.Html:10/10/2016:Jam01.52wib)).

Pada tahun 1955 di Jepang terdapat 3 partai yaitu: Liberal, demokrat dan Sosialis. Akan tetapi, setelah akhir tahun 1955 ketiga partai tersebut bergabung membentuk Partai Demokrat Liberal (LDP). Partai baru tersebut berhasil melakukan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan mampu mengikuti perkembangan lingkungan politik. Keberhasilan partai tersebut diikuti oleh berbagai partai oposisi yaitu Partai Sosialis Jepang (JSP) dll, tetapi gagal mengikutinya. Dominasi LDP terancam dua kemungkinan yaitu pertama LDP dikalahkan oleh partai oposisi dan yang kedua, perpecahan dari LDP itu sendiri. Bahaya tersebut akhirnya datang bersamaan pada tahun 1993. Akibat dari itu

muncul 3 partai baru yang 2 diantaranya dari LDP. The New Frontier Party (NFP) merupakan pembentukan dari LDP akan tetapi, pada tahun 1996 partai ini bubar setelah pemilu dengan meninggalkan partai Demokratik Jepang sebagai partai oposisi besar.

Sistem pemilu model lama dianggap sebagai pemicu terjadinya munculnya masalah di Jepang sehingga banyak yang menginginkan reformasi system pemilu Jepang. Salah satu pilihannya yaitu menggunakan system pemilu campuran-anggota. Berbagai masalah muncul dari akan di adakannya reformasi. Sehingga sampai berbagai cara dilakukan untuk meloloskan reformasi di Jepang. Akan tetapi setiap partai atau politisi ketika mendukung reformasi lebih cenderung menarik dua atau tiga tujuan sebagai berikut:

- (a) mengurangi biaya pemilu dan tingkat korupsi
- (b) Menggantikan kadidat center dengan menggunakan kampanye berpusat
- (c) bergerak menuju sistem dua partai yang akan menghasilkan pergantian kekuasaan antara pihak-pihak pemerintah dan partai-partai oposisi.

Campuran-anggota sistem pemilihan Jepang terdiri dari satu lapis SMDS dari 300 kursi dan tingkat PR dari 180 kursi (berkurang dari 200 setelah pemilu 1996. PR tier adalah dibagi menjadi blok sebelas, dengan besaran distrik berkisar 6-30 kursi. Mekanisme dari campuran-anggota adalah memilih satu kandidat SMDS dan memilih satu

kandidat dari PR. Surat suara yang diterima antara SMDS dan PR tidak saling mempengaruhi. Pemilihan ganda sangat menarik pihak dapat mengusulkan beberapa kandidat ganda. Konsekuensi dari reformasi pemilu yaitu pertama reformasi pemilu tidak dapat diperlakukan sebagai kejutan eksogen ke kesetimbangan dinyatakan stabil. Sistem stabil jarang melaksanakan reformasi utama. memang, di Jepang pemisahan LDP dan fragmentasi yang dihasilkan dari sistem kepartaian didahului dan kondisi yang diperlukan untuk memberlakukan reformasi. Perawatan diperlukan dalam membedakan efek dari sistem pemilihan baru dari perubahan yang telah dimulai sebelum reformasi disahkan. Masalah kedua adalah 'jangka panjang'. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kerangka waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi reformasi struktural adalah dekade tidak tahun. 282 Politik Sistem Pemilihan Jepang telah memiliki hanya tiga pemilu di bawah sistem baru dan generalisasi.

Menuju persaingan bipolar di tingkat kabupaten. Sejauh ini, efek yang paling jelas dari sistem pemilu telah berada di tingkat kabupaten pertama, ada kecenderungan yang kuat terhadap salah satu calon per partai per kabupaten. Jika seseorang hanya mempertimbangkan calon yang diusulkan tidak ada pihak pernah menjalankan dua kandidat secara bersamaan dalam satu SMD. Ada juga kecenderungan yang jelas terhadap kabupaten menampilkan bipolar persaingan antara satu wakil dari koalisi dan satu wakil oposisi, apa Cox (1997) menyebut hubungan

lintas kabupaten, kecenderungan menuju linkage telah terhalang oleh masalah kedua kubu telah menyepakati calon tunggal per kabupaten. Partai kecil sehingga memiliki insentif untuk menjalankan kandidat dalam SMDS putus asa untuk meningkatkan suara PR mereka. Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa insentif SMD mempromosikan pemilihan kerjasama truf PR insentif untuk berjalan dalam berharap satu sama lain. Partai-partai kecil memiliki panggilan memang menolak untuk kerjasama pemilu dan memiliki digunakan SMD nominasi untuk meningkatkan suara PR mereka.

LDP tanggapan terhadap tantangan DPJ adalah untuk mengadopsi kebijakan yang paling populer DPJ dan untuk memilih pemimpin dengan anti - LDP gambar. Secara keseluruhan LDP berlari kampanye lebih baik daripada DPJ pada tahun 2003, namun DPJ membuat salah satu langkah yang mengatasi banyak kekurangan lainnya: ia mengeluarkan manifesto pertama pernah disampaikan kepada para pemilih dalam pemilihan umum di Jepang. Secara keseluruhan LDP berlari kampanye lebih baik daripada DPJ pada tahun 2003, namun DPJ membuat salah satu langkah yang mengatasi banyak kekurangan lainnya: ia mengeluarkan manifesto pertama pernah disampaikan kepada para pemilih dalam pemilihan umum di Jepang. DPJ memecahkan dua masala. Pertama, baru partai yang belum pernah memegang kekuasaan harus selalu mengatasi kesenjangan kredibilitas. Kedua, manifesto DPJ menantang LDP untuk merespon dengan

manifesto sendiri. Tepat setelah pemilu 2003, banyak strategi LDP berpendapat bahwa menerbitkan sebuah manifesto adalah kesalahan taktis yang tidak harus diulang. Politisi muda khawatir tentang pemilihan ulang tampaknya merasa lebih penting untuk memiliki seorang pemimpin populer daripada dukungan dari faksi mereka. Perdana Menteri Koizumi juga telah mengobarkan perang terhadap faksi, mengurangi peran mereka dalam pembentukan kabinet dan dalam memilih pemimpin partai. SMDS telah memaksa LDP, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencari cara yang lebih sistematis memilih calon mereka, dan mencegah menolak calon dari berjalan terhadap calon.

Pihak tidak sistematis membedakan antara SMD dan PR calon sehingga kandidat berjalan di dua tingkatan terlihat mirip. Meskipun satu mendengar Jepang 289 keluhan tentang kekuatan jabatan di bawah sistem baru, keluhan-keluhan ini datang terutama dari potensi kandidat LDP yang merasa lebih sulit untuk menggeser suatu LDP incumbent. Anehnya belum ada bukti jabatan memproduksi setiap keuntungan dalam penilaian. Praktek pemerintah memang berubah sejak diberlakukannya pemilu reformasi tapi tidak ada perubahan dapat dikaitkan dengan sistem pemilu. Untuk Misalnya, pemerintahan koalisi jarang di bawah sistem pemilihan tua tetapi memiliki menjadi aturan di bawah sistem baru. Tiga aspek dari sistem pemilu yang baru telah menuai kritik serius dan dua perubahan telah disahkan menjadi undang-

undang. Kontroversi utama setelah pemilu pertama di 1996 prihatin pencalonan ganda. Masalah utama adalah pemerintahan koalisi yang termasuk Koumei yang menentang setiap pengurangan sama sekali. Kedua partai besar memiliki diusulkan pengurangan lebih lanjut di tingkat PR tapi mungkin meragukan apakah mereka akan mampu mencapai hal ini. Koumei rasional menentang setiap gerakan menuju sistem mayoritarian. baru pihak yang diciptakan pada tahun 1993 menciptakan mitra potensial baru dan Koumei mulai membayangkan dirinya sebagai bagian dari sebuah partai besar, akhirnya bergabung dengan NFP. Koumei mengejar tujuannya untuk kembali ke sistem lama dengan rasionalitas strategis yang sama yang diterapkan untuk memberlakukan sistem baru. Mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam koalisi dengan musuh lama yaitu LDP. Pemenang, di sisi lain, menemukan diri mereka mulai menghargai sistem baru terlepas dari sikap asli mereka, akhirnya, mengusulkan kembali ke sistem lama akan menyerahkan oposisi masalah yang menarik:' LDP sedang mencoba untuk memutar kembali waktu pada reformasi politik. Kesulitan dalam melewati pengurangan tingkat PR 200-180 kursi menegaskan prinsip dasar: sistem pemilu selalu sulit untuk berubah, tidak peduli berapa lama mereka telah di eksistensi.

Pada awalnya jepang memilik 3 partai dalam pemilihan akan tetapi, ketiga partai tersebut bergabung menjadi satu partai yang besar

yang bernama LDP. Namun lambat laun sistem ini di ubah sebab sudah di anggap sudah tidak layak lagi di pakai dalam pemilihan umum di negaranya. Dalam proses reformasi sistem tersebut banyak masalah-masalah yang dihadapi Jepang mulai dari sistem kepartaiannya sampai pada politisi saling mengemukakan argument baik yang sepaham maupun bertentangan. Dalam proses tersebut partai-partai besar muncul yaitu LDP, JSP, NFT, DPJ dan lain-lain. Akan tetapi pada saat itu jepang mencoba merubah sistem kepartaiannya dengan sistem anggota campuran dimana hanya ada satu lapis SMDS dari 300 kursi dan tingkat PR dari 180. Mekanisme dari campuran-anggota adalah memilih satu kandidat SMDS dan memilih satu kandidat dari PR. Surat suara yang diterima antara SMDS dan PR tidak saling mempengaruhi. Pemilihan ganda sangat menarik pihak dapat mengusulkan beberapa kadidat ganda. Sistem pemilihan ini. Sehingga dalam sistem partai baru ini Jepang lebih koheren dan pemilunnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Banyaknya partai yang menginginkan berdiri untuk menjadi sebuah partai yang kredibe. Selain itu, LDP yang dulu sebagai partai dominasi di Jepang berusaha membangun kembali kejayaannya melalui koalisi dan kooptasi. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang dalam menjalankan reformasi sistem pemilunnya. Akan tetapi setiap partai atau politisi ketika mendukung reformasi lebih cenderung menarik dua atau tiga tujuan sebagai berikut:

- (a) mengurangi biaya pemilu dan tingkat korupsi

(b) Menggantikan kadidat center dengan menggunakan kampanye berpusat

(c) bergerak menuju sistem dua partai yang akan menghasilkan pergantian kekuasaan antara pihak-pihak pemerintah dan partai-partai oposisi.

Sistem dua partai dalam pemerintahan Jepang masih banyak pihak yang ini merubahnya kembali terutama LDP yang ingin menjadi partai satu-satunya dalam pemerintahan Jepang seperti dulu. Sehingga pemerintah harus terus menjaga kestabilan politik dalam negerinya baik stabilitas ekonomi maupun stabilitas kehidupan social bangsanya. Sehingga sistem dua partai yang di bangun jepang dalam sejarah yang panjang dan berbagai cara dilakukan tidak menjadi sia-sia semua usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, sistem politik jepang selalu menjadi sistem yang sesuai dengan kebudayaan dan kehidupan social masyarakatnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang direncanakan sejak awal untuk menjadikan jepang Negara maju. Meskipun jepang menghadapi berbagai tempaan untuk mempertahankan politik dua partai yang mereka kehendaki agar sistem dua partai tetap bertahan dan digunakan dalam pemerintahan di jepang.

Jepang akhir-akhir ini bergerak menuju sistem dua partai. Partai politik Jepang menjadi lebih koheren dan pemilu menjadi lebih baik. Sistem pemilu yang baru telah memainkan peran dalam menciptakan trend baru akan tetapi, Kecenderungan ini tampaknya kuat, sebab

setelah berhasil dari kegagalan upaya pertama untuk menciptakan sebuah partai oposisi yang kredibel dan LDP untuk membangun kembali dominasi satu partai melalui strategi tradisional kebijakan kooptasi dan perluasan koalisi. Jika tren ini harus dirubah seperti semula, mungkin akan terjadi perpecahan partai atau strategi baru yang sukses dari LDP. Kedua partai besar yang tercabik-cabik oleh sengketa kebijakan dan banyak politisi, penataan yang akan menghasilkan partai yang akan setuju dengan preferensi kebijakan sendiri. Kekuasaan politik harus menjaga LDP bersama-sama sampai pemilu berikutnya, namun DPJ dengan mudah memecah. Bahkan mungkin merupakan dari kebocoran stabil pembelot individu untuk partai berkuasa yang telah ditandai periode interelection sejak tahun 1993. Namun demikian, pembelot tidak berjalan dengan baik di Pemilu 2003 dan hasil pemilu yang harus membuat lebih mudah bagi DPJ untuk menarik kandidat dalam pemilu berikutnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana LDP mungkin membangun kembali dominasi satu partai. namun sejarah menunjukkan bahwa kita tidak boleh meremehkan fleksibilitas pihak yang memiliki dua kali sebelum mencapai apa pengamat dianggap mustahil. Pada 1950-an kritikus mengasumsikan bahwa nilai-nilai inti LDP adalah revisi konstitusional dan persenjataan kembali. Ketika dua kebijakan tersebut tidak terkenal maka dapat mengancam memisahkan partai dari kekuasaan dan menyerahkan mereka untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonom. pada akhir tahun 1960-an membuat fokus

pada pertumbuhan ekonomi pecundang suara dan pada tahun 1970 partai disesuaikan dengan realitas baru ini juga. Sebagai menangkap semua pihak dengan tidak stabil komitmen kebijakan, LDP mungkin dapat menemukan cara lain untuk mempertahankannya berpegang pada kekuasaan. Secara pribadi, bagaimanapun, taruhan saya pada evolusi lanjutan menuju dua partai sistem dan pergantian kekuasaan dalam tiga pemilu berikutnya.

<http://handalwidi.blogspot.co.id/2014/03/tugas-teori-perbandingan-politik-jepang.html>:10/06/2016:01.58wib.)

5) Malaysia

Malaysia merupakan negara demokrasi parlementer yang bentuknya adalah monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Malaysia menggunakan system multi partai. Partai yang berkuasa di Malaysia adalah merupakan kumpulan partai2 yang beraliansi yang disebut sebagai Barisan Nasional dimana di dalamnya termasuk UMNO (United Malays National Organization). Selain itu, ada pula partai2 lain di luar Barisan Nasional seperti

Democratic Action Party dan Partai Keadilan Rakyat. Malaysia memiliki sekitar 30 partai politik yang kesemuanya memiliki wakil di parlemen.

Eksekutif Kepala negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agong. Yang Dipertuan Agong menjabat selama 5 tahun dan dipilih dari 9 sultan di 9 negara bagian secara bergilir. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, system politik di Malaysia mengadopsi system Westminster. Anggota di cabinet dipilih dari anggota kedua badan di parlemen.

Legislatif Malaysia memiliki system bicameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun. Judikatif Sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan UU serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts, Session's Courts, Magistrate's courts dan Juvenile Courts. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan

federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain.

Pemerintah Negara Bagian

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (chief minister). Kepala menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian. Ada 13 negara bagian di Malaysia serta 3 wilayah federal yaitu Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya sebagai wilayah administratif federal. Setiap negara bagian memiliki majelis dan pemerintahannya dipimpin oleh kepala menteri.

- Mahathir Muhammad menjadi PM pada periode 1981-2003. Beliau membawa UMNO dan Barisan Nasional mencapai masa kesuksesannya. Di masa pemerintahannya, PM Mahatir menekankan pada pembangunan ekonomi, terutama di sektor ekspor dan infrastruktur. Mahatir menolak berhubungan dengan negara-negara barat dan bahkan menolak bantuan IMF pada krisis ekonomi 1997-1998. Mahathir memecat Deputy PM Anwar Ibrahim karena tuduhan tindakan tidak bermoral serta dugaan korupsi. Anwar menyanggah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa penyebab dirinya dipecat adalah perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Mahathir. PM Mahathir turun jabatan setelah 22 tahun berkuasa dan digantikan oleh Deputy PM Abdullah Ahmad Badawi. Badawi menekankan pada pentingnya pendidikan, kerukunan social dan kemajuan bidang ekonomi.

Dominasi etnis Melayu dalam politik Malaysia merefleksikan adanya hubungan saling mempengaruhi antara konsepsi keamanan etnis Melayu dan konsepsi keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan oleh etnis Melayu terefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Kebijakan New Economic Policy yang lahir setelah kerusuhan berdarah tahun 1969 merupakan refleksi dari keinginan kuat elit Melayu guna mendongkrak kemampuan etnis Melayu yang secara ekonomi lebih lemah dibandingkan dengan etnis Tionghoa.

(<https://tipsntrends.wordpress.com/2013/03/08/sistem-politik-malaysia/>:10/06/2016:jam02.09wib.)

Partai-partai politik Malaysia

1. Barisan Nasional
2. Parti Tindakan Demokratik (DAP)
3. Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
4. Parti Keadilan Rakyat (PKR)
5. Barisan Jamaah Islamiah Semalaysia (BERJASA)
6. Parti Gerakan Rakyat Malaysia
7. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP)
8. Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak Peoples' Progressive Party (PPP)
9. Sarawak United People's Party
10. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA)
11. Parti Pekerja-pekerja Malaysia
12. Parti Rakyat Malaysia
13. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragan Bersatu (PASOK)
14. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS)

15. Parti Bersatu Sabah (PBS)
 16. Parti Momogun Kebangsaan Sabah (Sabah National Momogun Party) (MOMOGUN)
 17. Parti Kongres Persatuan Masyarakat
 18. Parti Angkatan Keadilan Rakyat (AKAR) - Sabah
 19. Parti Liberal Demokratik-Sabah
 20. Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU)
 21. Parti Keadilan Rakyat (PKR)
 22. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA)
 23. Parti Maju Sabah
 24. Parti Reformasi Negeri (STAR)
 25. United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO)
 26. Parti Angkatan Keadilan Insan Malaysia (AKIM)
 27. Parti Demokratik Malaysia (MDP)
 28. Parti Barisan Kemajuan India Se-Malaysia (AMIPF)
 29. Parti Punjabi Malaysia (PPM)
- (https://id.wikipedia.org/wiki/Partai-partai_politik_Malaysia:10/06/2016;jam02.13wib.)

6) India

India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai yang kuat. Majelis rendah disebut *Lok Sabha* (majelis rakyat) beranggotakan 545 orang. Majelis tinggi disebut *Rajya Sabha* (majelis Negara bagian) dengan anggota 250 orang. Parlemen India (atau Sansad) adakah badan legislatif tertinggi India. Parlemen ini terdiri dari dua dewan – Lok Sabha dan Rajya Sabha. Parlemen India terletak di New Delhi di Sansad Marg. Lok Sabha (disebut juga Dewan

Rakyat oleh Konstitusi India) adalah majelis rendah dalam Parlemen India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk dewasa India.

Majelis Rendah adalah salah satu dari dua “kamar” dalam sistem dua kamar di mana pasangan lainnya adalah Majelis Tinggi. Di banyak negara, majelis ini seringkali memiliki kekuasaan yang besar karena adanya batasan terhadap kekuasaan Majelis Tinggi. Dalam sistem parlementer, hanya Majelis Rendah yang dapat mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. Beberapa nama yang umum digunakan untuk Majelis Rendah (*lower chamber*) adalah:

- *Chamber of Deputies*
- *Chamber of Representatives*
- *House of Assembly*
- *House of Commons*
- *House of Representatives*
- *Legislative Assembly*
- *National Assembly*

Konstitusi India disetujui parlemen pada tahun 1950. Konstitusi ini memperoleh inspirasi dari konstitusi Amerika Serikat serta ide-ide

dan praktek-praktek konstitusi Inggris. Konstitusi ini menetapkan India sebagai Unie Negara Bagian (kini terdapat 22 negara bagian) dan beberapa wilayah administrasi federal. Tiap Negara bagian memiliki seorang gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, badan legislatif, dan badan pengadilan sendiri. Pemerintahan uni atau federal, dikepalai oleh presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh suatu kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana Menteri. Sedangkan dalam yudikatif, pengadilan negeri pusat memiliki badan pengadilan tinggi yang dikepalai oleh ketua Mahkamah Agung. Setiap warga negara India yang telah berusia 21 tahun memiliki hak pilih Kesatuan nasional India masih tetap berlangsung meskipun konstitusi India telah berkali-kali diubah. Peta politiknya juga pernah berubah karena terbentuknya beberapa negara baru dan adanya penyesuaian tapal batas sebagai tanggapan terhadap tuntutan pemerintahan otonomi yang lebih besar dari beberapa kelompok suku dan bahasa. India modern juga telah mengambil alih beberapa koloni Prancis di anak benua ini. Kongres Nasional India (*Indian National Congress*) atau dikenal dengan Partai Kongres atau Kongres I (yang berarti “Indira”, untuk membedakannya dengan partai pecahannya, yang disebut “Kongres O” yang dipimpin oleh K. Kamaraj, seorang tokoh politik dari Tamil Nadu). Partai yang namanya biasa disingkat INC ini adalah partai politik besar di India,

dengan lebih dari 15 juta orang yang terlibat dalam organisasinya dan lebih dari 70 juta orang ikut serta dalam perjuangannya melawan Imperium Britania. Setelah kemerdekaan pada 1947, partai ini menjadi partai politik yang dominan di negara itu.

Dalam Lok Sabha (Parlemen) ke-14 (2004–2009), 145 anggota INC, kelompok yang terbesar di antara semua partai lainnya, duduk sebagai anggotanya. Saat ini partai ini adalah anggota utama dari pemerintahan koalisi Aliansi Progresif Bersatu yang didukung oleh Front Kiri. Partai lain di India adalah Partai Komunis India adalah sebuah partai politik komunis di India. Partai itu dibentuk pada tahun 1920. Sekretaris Jenderal partai adalah A.B. Bardhan. Partai itu menerbitkan *New Age*. Organisasi pemuda partai ialah *All India Youth Federation*. Dalam pemilihan umum 2004, partai itu meraih 5.434.738 suara (1.4%, 10 kursi). India adalah sebuah negara besar berpenduduk mayoritas Hindu. Dari total 1,1 milyar penduduk India, 15 persen diantaranya, sekitar 150 juta jiwa, menganut agama Islam. Karenanya Muslim adalah penduduk minoritas terbesar di India. Pecahnya India pada tahun 1947 menjadi India dan Pakistan didasari keyakinan oleh beberapa tokoh politik India saat itu bahwa Hindu dan Muslim tidak bisa hidup dibawah satu atap negara. Perpecahan berdarah pada bulan Agustus 1947 ini meninggalkan luka emosional dua komunitas besar di Asia Selatan ini. Meskipun pada akhirnya India mengadopsi sebuah sistem pemerintahan yang sekuler dan demokratis, pada

perkembangannya, isu komunalisme agama kembali terseret kedalam kancah politik nasional.

Kampanye politis penuh nuansa komunalisme dan kebencian yang dimulai pada awal tahun 1980an dan berpuncak pada insiden berdarah penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992 (berlanjut kepada kerusuhan-kerusuhan komunal di Mumbai, Maharashtra tahun 1993 dan Godhra di Gujarat pada tahun 2002) ini telah memberikan hasil politik yang variatif kepada BJP (*Bharatiya Janata Party* – Partai Rakyat India). Kesuksesan BJP membangun ikatan emosional dengan pemilih, terutama dengan golongan Hindu kasta tinggi yang merasa dicurangi oleh kebijakan pemerintah melalui implementasi proyek Mandal yang menyediakan reservasi pekerjaan untuk golongan Hindu kasta rendah, telah mengantarkan BJP ketampuk kekuasaan di negara bagian Uttar Pradesh pada tahun 1991. BJP memenangi 221 kursi dari 425 kursi dewan yang diperebutkan. Ini menunjukkan bahwa isu keagamaan bisa diangkat sebagai tema utama kampanye politik. Akan tetapi, pasca insiden Masjid Babri 1992, reaksi terhadap sikap militan BJP ini berbalik 180 derajat. Hasil sebuah jajak pendapat pasca insiden oleh majalah nasional India Today menunjukkan bahwa 52 % rakyat India menolak penghancuran Masjid Babri, 39 % mendukung dan 8 % tidak mempunyai pendapat. 52 % responden jajak pendapat ini berpendapat BJP telah melanggar hukum. Hal ini dibuktikan lebih lanjut dengan kekalahan BJP didalam pemilu daerah di Madhya Pradesh dan Uttar

Pradesh pada tahun 1993. Keadaan yang bertolak belakang ini telah membuat BJP menata ulang strategi politiknya. Oleh karenanya, meskipun hubungannya dengan organisasi-organisasi Hindu puritan masih sangat dekat, di dalam pemilu-pemilu berikutnya – 1996, 1998 dan 1999, BJP memroyeksikan diri sebagai partai moderat yang memikirkan kepentingan umum daripada sebuah partai Hindu nasionalis yang militan. Selain sebagai konsekwensi dari pemroyeksian BJP sebagai penantang partai-partai politik lain yang mempunyai basis pendukung serupa, keputusan ini diambil karena untuk memperbesar jumlah pendukung.

(<https://younghendra.wordpress.com/2009/01/26/profil-india/>:10/06/2016:jam02.19wib.)

India memiliki sistem multi-partai dengan pengakuan terhadap partai-partai tingkat negara bagian dan nasional. Status tersebut diperhatikan secara periodik oleh Komisi Pemilihan India. Partai politik lainnya yang meminta untuk mengikuti pemilihan lokal, negara bagian atau nasional diminta untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan India (KPI). Partai-partai yang terdaftar dianggap sebagai partai tingkat negara bagian atau nasional yang berdasarkan pada kriteria obyektif. Partai yang disahkan diberikan hak untuk membuat simbol partai, waktu penyiaran bebas pada acara televisi dan radio yang dijalankan negara bagian, mengkonsultasikan perencanaan tanggal

pemilihan dan memberikan input-input dalam regulasi dan peraturan elektoral.

([Http://www.wikiwand.com/id/Daftar_partai_politik_di_India](http://www.wikiwand.com/id/Daftar_partai_politik_di_India):10/06/2016:jam02.30wib.)

3. Tinjauan Tentang Elektabilitas

a. Pengertian Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Kata elektabilitas umumnya muncul berkaitan dengan pemilu, pilkada atau pilpres, ya seperti sekarang ini jelang pemilu 2014 dan pada beberapa daerah di Indonesia yang sedang mengadakan Pilkada. Kata elektabilitas bisa dikaitkan dengan sosok yang akan dipilih atau nama partai peserta pemilu. Tidak pernah ada elektabilitas itu dikaitkan dengan produk sepeda motor, padahal pada prakteknya elektabilitas produk sepeda motor itu yang menentukan dipilih atau tidaknya oleh pembeli.

Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil

meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

([Http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/beda-pengertian-elektabilitas-dan.html](http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/beda-pengertian-elektabilitas-dan.html); 10/06/2016; jam 02.35 wib.)

b. Dasar Mengukur Elektabilitas

Menurut azia-fisip dalam riset politik bahwa:

Elektabilitas merupakan hal yang bersinergi namun serupa tak sama. Popularitas Kandidat tinggi belum tentu memiliki korelasi elektabilitas yang tinggi. Masih banyak yang belum mengetahui bagaimana meningkatkan elektabilitasnya? Pengukuran elektabilitas sering kali dilakukan dengan mengadakan serangkaian survey. Hal ini untuk mengetahui secara tepat bagaimana posisi kandidat versus posisi lawan.

Beberapa survey yang lazim diadakan oleh lembaga survey:

1. Media framing baik cetak maupun elektronik
2. Membuat polling dengan teknologi SMS

Cara untuk meningkatkan elektabilitas yaitu:

1. Gunakan hasil survey dengan analisis SWOT
2. Mendesiminasikan visi misi kandidat melalui media massa
3. dan atau melalui forum-forum lintas warga. Biaya murah meriah dengan melalui sosial media namun keefektifannya belum teruji
4. Membuat opini dengan menyertai solusi di media massa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur elektabilitas adalah:

1. Mengenal diri
2. Mengenal lawan politik
3. Kenali medan politik anda. Melakukan pemetaan yang baik
4. Mengenal perilaku pemilih. Mengkondisikan diri menjadi bagian masyarakat untuk bisa mengetahui kebutuhan masyarakat
5. Disarankan untuk menyewa konsultan politik untuk mengukur elektabilitas agar presisinya tinggi.

([Http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49934-riset%20politik-Bagaimana%20Mengukur%20Elektabilitas%20Kandidat.html](http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49934-riset%20politik-Bagaimana%20Mengukur%20Elektabilitas%20Kandidat.html):10/06/2016;jam:05.30WIB.)

c. Konsep Elektabilitas dan Citra Politik

Elektabilitas partai politik dapat kita ukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai elektabilitas dan citra politik ini dianggap relevan.

A. Elektabilitas

Dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya.

Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi

adalah orang yang populer. Memang kedua konstataasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa, berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya.

Pada gilirannya, dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan kepentingan rakyat

pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah.

Menurut pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf bahwa elektabilitas tinggi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada faktor pendukung lain. Dukungan partai, data survei internal partai, serta kebijakan partai yang secara hierarki umumnya harus ditentukan oleh keputusan pengurus di tingkat pusat masing-masing partai.

Bila kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas yang tertera di atas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan, sikap dan dukungan yang dimiliki oleh khalayak.

B. Citra Politik

Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat penting adalah terbentuknya citra politik yang baik bagi khalayak terhadap politikus atau pemimpin politik atau partai politiknya. Citra politik juga dapat terbentuk dari proses pembelajaran politik ataupun juga sosialisasi politik yang berlangsung terus-menerus.

Citra politik terbentuk atau terbangun dari informasi yang kita terima baik langsung maupun melalui media politik termasuk media massa. Citra politik sendiri dapat diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh masyarakat. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik, yang kemudian memaknai gejala itu dengan nilai, kepercayaan dan pengharapan yang berangkat dari pendapat pribadi kemudian dikembangkan menjadi pendapat umum.

Pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah secara langsung telah membuat semakin pentingnya citra seorang figur maupun sebuah partai di mata konstituennya. Kandidat yang akan bertarung akan berusaha semaksimal mungkin membangun citra politiknya di masyarakat, baik melalui media perantara atau terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Menurut piliang, pencitraan politik adalah sesuatu yang tampak oleh indra tapi tidak memiliki eksistensi substansial karena ketertutupan realitas. Ketertutupan substansi tersebut jika berjalan terus-menerus akan menghasilkan implikasi yang kurang baik bagi sistem politik, karena popularitas seorang tokoh atau institusi politik tidak berpijak pada kualitas politik yang sesungguhnya.

Citra politik ini sangat berpengaruh terhadap popularitas seseorang atau sebuah institusi dalam hal ini partai, dimana jika citra seseorang atau partai baik, maka meningkat pula popularitasnya, dalam hal ini semakin baik citra partai tersebut, maka akan semakin banyak yang menyukai dan mendukung partai tersebut. sebaliknya, citra kepopuleran dan simbol yang diciptakan akan jatuh bilamana mendapat serangan politik dari figur maupun partai. Simbol-simbol yang dibangun akan melemah jika telah hadir kekuatan baru yang mampu menandingi kekuatan yang telah dikonstruksi.

Dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan citra politik atau membentuk persepsi politik khalayak. Berita politik tentang tokoh politik, partai politik, dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. Itulah sebabnya citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realitas politik yang tidak harus sesuai dengan yang sebenarnya.

Lee Loevinger dalam Anwar Arifin, menyajikan teori komunikasi massa yang disebut sebagai *reflective-projective theory*. Asumsi dasar teori ini bahwa :

“Media massa adalah cermin masyarakat yang merefleksikan suatu citra yang menimbulkan banyak tafsiran. Justru itu, setiap orang dapat memproyeksikan diri dan citranya. Media massa mencerminkan citra masyarakat dan sebaliknya khalayak memproyeksikan citranya pada penyajian media massa.”

Citra politik juga berkaitan dengan sosialisasi politik. Karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik, baik secara langsung maupun pengalaman empirik. Sosialisasi politik yang dapat mendorong terbentuknya citra politik dapat mendorong seseorang atau institusi mengambil peran dalam politik dengan berbagai cara. Peningkatan citra merupakan bagian dari perencanaan komunikasi dan sosialisasi.

(http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49934-riset%20politik-Bagaimana%20Mengukur%20Elektabilitas%20Kandidat.html:10/06/2016:jam:05.30WIB.)

d. Faktor Meningkatkan Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh

kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan. Padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam penelitian psikologi sosial telah ditemukan secara luas bahwa informasi mengenai apa yang dilakukan sebagian besar orang mampu mempengaruhi perilaku individu. Salah satu teori yang sering digunakan adalah *bandwagon effect*. Teori ini berpendangan bahwa individu cenderung mengikuti apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Contoh sederhananya adalah orang berama-ramai mendengarkan musik grup band tertentu karena melihat atau mendengar banyak orang mendengarkan music tersebut. Tidak hanya bermanfaat bagi target, *band wagon effect* juga bermanfaat bagi pelaku karena dapat menjadi *self fulfilling prophecy* (sebuah prediksi yang secara langsung atau tidak dapat menjadi benar).

Keterpilihan seorang kandidat calon Presiden dipengaruhi oleh Perilaku Pemilih. Sesungguhnya untuk melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka terhadap Calon Presiden maupun

Calon Legislatif dapat dipahami dengan beberapa pendekatan. Dekade 1950an, voting behaviorial ini didasarkan pada melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh mahzab Colombia (Colombia School of electoral behaviorial) dan mahzab psikologis yang dikembangkan oleh mahzab Michigan (The Michigan Survey Center).

Pendekatan sosiologis ini melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh segala kegiatan yang berkonteks sosial. Menurut Afan Gafar (dalam buku *Javanese Voter*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992 hal 5), pendekatan sosiologis ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial, lingkungan keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan juga kepercayaan seseorang. Namun menurutnya analisis mengenai organisasi formal yang diikuti oleh pemilih juga perlu diperhatikan, misalnya serikat buruh, kelompok pengajian dan sebagainya. Intinya, pendekatan sosiologis ini berasumsi bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Pendekatan psikologis lahir akibat adanya kelemahan dari pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, *attitude* seseorang juga berpengaruh dalam melihat perilaku pemilih.

Menurut Dennis Kanvanagh pendekatan perilaku pemilih terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologis didasarkan pada mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan struktural didasarkan pada struktur yang dibangun, artinya pemilih melihat partai politik dari struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian dan program yang ditonjolkan partai.

Pendekatan ekologis didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap pilihan mereka. Pendekatan

pilihan rasional (*rational choice*) adalah pendekatan yang melihat adanya perhitungan untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Di sini faktor pendidikan dan kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Pendekatan ini dimotori oleh Anthony Down (1957) yang menyatakan bahwa pemilih bukannya wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari dalangnya dan orientasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

1. Faktor eksternal: Orientasi isu-isu yang berpusat pada pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat dan diangkat menjadi visi, misi, tujuan serta kebijakan program kerja.
2. Faktor internal: figur dan karakter kandidat melalui pembentukan image berupa citra, reputasi dan kredibilitas tanpa memperhatikan label partainya.

Berikut, adalah hasil studi menarik yang dilakukan *Barna Research Group for Election 2012* di Amerika. Grup ini melakukan survey untuk mengetahui faktor elektabilitas apa saja yang mempengaruhi *voters* (pemilih) mencoblos *candidates* (calon). Yang paling tinggi persentasenya adalah isu politik yang digulirkan calon, yaitu sebanyak 83% dari kemungkinan pemilih. Urutan berikutnya adalah karakter (51%). Seterusnya disusul faktor lain seperti afiliasi partai politik calon (17%); pengalaman politik (16%); agama calon (14%); latar belakang pendidikan (6%); kemampuan berbicara (3%); kepribadian (2%); usia (1%); dan penampilan fisik (kurang dari 1%). Hasil dari survey ini menjelaskan kemenangan Obama sebagai *incumbent*. Sebagian besar *voters* memilih Obama karena tertarik program kesehatan dan kebijakan pajaknya.

Sisi menarik yang patut diulas dari hasil survey ini adalah penempatan isu politik/program calon sebagai determinan utama elektabilitas. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Amerika dalam berpolitik. Mereka memandang Pemilu sebagai instrument penting demokrasi. Mereka memanfaatkan Pemilu dengan baik untuk

memperbaiki nasib bangsa. Karena itu mereka memilih Presiden mumpuni dengan visi jauh kedepan. Tidak satupun dari mereka yang melirik politik pencitraan.

([Http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49934-riset%20politik-Bagaimana%20Mengukur%20Elektabilitas%20Kandidat.html](http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49934-riset%20politik-Bagaimana%20Mengukur%20Elektabilitas%20Kandidat.html):10/06/2016:jam:05.30WIB.